

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI

2013-2017

KOTA BONTANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BONTANG

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI

2013-2017

KOTA BONTANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BONTANG

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BONTANG

2013—2017

Nomor Publikasi : 64740.1802

Katalog BPS : 9302003.6474

Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 162 Halaman

Naskah :

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Gambar Cover oleh :

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Diterbitkan oleh:

©Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG

Assalamualaikum Wr. Wb

Penerbitan Publikasi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2013-2017 merupakan hasil kerja sama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang dengan Badan Pusat Statistik Kota Bontang. Publikasi ini menunjukkan gambaran kinerja perekonomian Kota Bontang, dan melalui publikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, potensi daerah, dan pendapatan perkapita masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.

Selain itu, data statistik PDRB ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pengambil keputusan maupun *stake holder* sebagai bahan analisa, perencanaan, dan evaluasi untuk menentukan target dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan yang terlaksana dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat Kota Bontang.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2013-2017. Akhirnya saran, kritik, dan usul yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bontang, Oktober 2018
Walikota Bontang

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	2
C. KEGUNAAN PDRB	6
BAB II METODE PENGHITUNGAN PDRB.....	7
A. PENGHITUNGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	7
A.1 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	7
A.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	13
A.3 INDUSTRI PENGOLAHAN	16
A.4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS.....	24
A.5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG 26	
A.6 KONSTRUKSI	27
A.7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.....	29
A.8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	31
A.9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	36
A.10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI	38
A.11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI.....	40
A.12 REAL ESTAT	49
A.13 JASA PERUSAHAAN	50
A.14 ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 52	
A.15 JASA PENDIDIKAN.....	53
A.16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	54
A.17 JASA LAINNYA.....	55
B. PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN	59
B.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	59
B.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	62
B.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	66
B.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	70
B.5 PERUBAHAN INVENTORI.....	72
B.6 EKSPOR DAN IMPOR.....	76

C.	DISTRIBUSI/PERSENTASE PDRB	77
D.	LAJU PERTUMBUHAN PDRB	77
E.	INDEKS IMPLISIT	78
F.	PDRB PER KAPITA	78
G.	ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)	79
H.	ANALISIS SHIFT-SHARE	80
I.	INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)	80
J.	INCREMENTAL LABOUR OUTPUT RATIO- ILOR.....	82
BAB III ANALISIS PEREKONOMIAN KOTA BONTANG		83
A.	KONDISI EKONOMI	83
A.1	INDEKS PERKEMBANGAN	84
A.2	INDEKS BERANTAI	85
A.3	INDEKS HARGA IMPLISIT	87
B.	TINJAUAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	88
B.1	STRUKTUR EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA	89
B.2	PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA	92
B.3	PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA.....	94
C.	TINJAUAN PDRB MENURUT PENGELUARAN.....	105
C.1	STRUKTUR EKONOMI MENURUT PENGELUARAN.....	105
C.2	PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN.....	108
C.3	PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN	111
C.4	INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	117
D.	PDRB PERKAPITA	119
E.	PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR	120
F.	HUBUNGAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMISKINAN.....	124
D.1	KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG	125
D.2	KEMISKINAN DAN PDRB PENGELUARAN	127
BAB IV PENUTUP		130

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Tahun 2013-2017.....	84
Tabel 3.2.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Tahun 2013-2017.....	86
Tabel 3.3.	Indeks Harga Implisit Dan Perubahannya Tahun 2013-2017	88
Tabel 3.4.	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017	90
Tabel 3.5.	Indeks LQ Lapangan Usaha Dengan Migas di Kota Bontang Tahun 2013-2017.....	100
Tabel 3.6.	Indeks LQ Lapangan Usaha Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2013-2017	103
Tabel 3.7.	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013—2017 (Persen)	109
Tabel 3.8	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013—2017 (Persen)	110
Tabel 3.9.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013-2017 (Juta Rp)	111
Tabel 3.10.	Analisis ICOR Kota Bontang Tahun 2011-2017	118
Tabel 3.11.	Analisis ILOR Kota Bontang Tahun 2013-2017.....	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Struktur Ekonomi Kota Bontang Tanpa Migas Tahun 2013-2017 (Persen).....	92
Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bontang Tahun 2013-2017 (Persen).....	93
Grafik 3.3. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Di Kota Bontang Tahun 2013-2017.....	95
Grafik 3.4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Menurut Pengeluaran Tahun 2017 (Persen).....	108
Grafik 3.5. PDRB Perkapita Kota Bontang, Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	120
Grafik 3.6. PDRB Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur (Dengan Migas) Tahun 2017 (Persen).....	121
Grafik 3.7. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ribu Rupiah).....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dalam merencanakan pembangunan ekonomi, diperlukan beragam data statistik untuk dasar menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

B. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep2 penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (equivalent). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (statistical discrepancy).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Di dalam berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat tersebut terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi (permintaan) akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu,

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

	<i>Y (Income)</i>
<i>= PDRB Produksi</i>	
<i>C (Consumption)</i>	<i>= Konsumsi akhir</i>
<i>GFCF (Gross Fixed Capital Formation)</i> <i>Tetap Bruto</i>	<i>= Pembentukan Modal</i>
<i>\Delta Inventori</i>	<i>= Perubahan Inventori</i>
<i>X</i>	<i>= Ekspor</i>
<i>M</i>	<i>= Impor</i>

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

C. KEGUNAAN PDRB

PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain sebagai berikut.

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu negara/wilayah. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara/wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri/luar daerah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II METODE PENGHITUNGAN PDRB

A. PENGHITUNGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

A.1 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

A.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang di tujukan untuk dijual.

A.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik tanaman pangan BPS.

A.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Subkategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

A.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

A.1.1.4 Peternakan

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

A.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pem-besaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan pengkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getah-an, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

A.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data

struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat penen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan

komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

A.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

A.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan

hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang di-gunakan **adalah pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitung-an. Sedangkan NTB atas dasar harga kons-tan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

A.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarinagan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/ penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

A.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

A.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan,

pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

A.3 INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

A.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Migas

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk

disini adalah pengope rasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

A.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

A.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotong-an serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

A.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Sub kategori ini merupakan gabung-an dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga

mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi sesuai pesanan dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

A.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

A.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/ pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

A.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subsektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Percetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

A.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

A.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

A.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

A.3.11 Industri Logam Dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

A.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang

membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

A.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28 .

A.3.14 Industri Alat Angkutan

Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30

A.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah

aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

A.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sub kategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sub kategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Sub kategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman hingga Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu

Indeks produksi Industri Besar Sedang dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil diperoleh dari Direktorat Statistik Industri,—BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP BPS RI.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara **revaluasi**, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan **ekstrapolasi** yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan sub kategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

A.4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

A.4.1 Ketenagalistrikan

Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar,

sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

A.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistri busian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun

konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

A.5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjut nya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010

adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/ Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi-BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS RI; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS.

A.6 KONSTRUKSI

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil:

instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku sektor konstruksi adalah metode **ekstrapolasi** dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik ekspor-BPS dan asosiasi semen Indonesia (ASI) impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

A.7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

A.7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya

Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan

mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

A.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik

Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

A.8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

A.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu **pendekatan produksi**. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi** yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya.

NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

A.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan **metode ekstrapolasi** dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

A.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini

sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan **metode ekstrapolasi**, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

A.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi**, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang

diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

A.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi**, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan output untuk masing-masing harga.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan

rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Airlines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

A.8.6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan **metode deflasi**, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Rekha, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

A.9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

A.9.1 Penyediaan Akomodasi

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

Nilai Tambah Bruto sub kategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

A.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

A.10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemogram-an, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pe-mrograman (radio dan televisi) ini menca-kup pembuatan muatan atau isi siaran dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan teleko-munikasi dan kegiatan jasa yaitu atau perolehan hak untuk menyalurkannya pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode deflasi**, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi

Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

A.11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

A.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/ surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

A.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/ kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup

kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

A.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik

Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. **Sewa guna usaha dengan hak opsi** mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. **Pembiayaan konsumen** mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. **Pembiayaan kartu kredit** mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. **Pembiayaan anjak piutang** mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan pro duksi**. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

A.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek.

Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga

Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan

menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

A.12 REAL ESTAT

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan

pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

A.13 JASA PERUSAHAAN

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang

mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **revaluasi**. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

A.14 ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga

mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara **ekstrapolasi**. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K₁, K₂, K₃), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

A.15 JASA PENDIDIKAN

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga,

hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

A.16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan

pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

A.17 JASA LAINNYA

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/ kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian

antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata out-put per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukam Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kelompok ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Cooperation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.

B. PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Uraian pengeluaran yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

B.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin pada besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut.

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki

3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut.

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);
2. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
3. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
4. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
5. Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah sebagai berikut.

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
2. Jumlah penduduk pertengahan tahun.
3. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
4. Indeks Harga Konsumen (IHK).

Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) untuk beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang

dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besaran PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara men-deflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut.

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Konsumsi makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Konsumsi bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Melakukan koreksi terhadap data poin pertama dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
3. Data pada poin kedua dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
4. Berdasarkan langkah pada poin ketiga diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan.
5. Menyusun indeks implisit berdasarkan IHK kota (provinsi/kota terdekat) dengan 7 kelompok COICOP.
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

B.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini

berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Yang dimaksudkan dengan harga yang tak berarti secara ekonomi adalah harga yang biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut.

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, namun terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak yang sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga.
3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
5. Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktif, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota lembaga yang dimaksud

di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/ olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Cakupan

Nilai pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri atas empat komponen berikut ini.

1. Konsumsi antara, misalnya pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, dan sewa perlengkapan kantor.
2. Kompensasi tenaga kerja, yaitu upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya.
3. Penyusutan.
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contohnya PBB, STNK, BBN.

Sumber Data

1. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
2. Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
3. Hasil pemutakhiran direktori LNPRT.
4. Informasi yang diperoleh dari hasil pemutakhiran direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
5. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut.

1. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Nilai barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

2. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). Sedangkan PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

B.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Konsumsi akhir pemerintah mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan

barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sebagai berikut.

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, contohnya aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditas (pendapatan jasa).

Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

PK-P suatu kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota tersebut.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

1. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
2. Statistik Keuangan Daerah, BPS
3. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
4. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
5. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
6. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

Metode Penghitungan

1. PK-P Provinsi/Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut ini.

PK-P adh Berlaku =

Output non pasar-penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk tingkat provinsi, PK-P provinsi atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri ditambah dengan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut ditambah dengan pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut dan ditambah dengan pengeluaran

pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, PK-P kabupaten/kota atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri ditambah dengan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dan ditambah dengan pengeluaran pemerintah Pusat dan pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. PK-P Provinsi/Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator sebagai berikut.

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

B.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup sebagai berikut.

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products).
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber Data

1. Output industri konstruksi, BPS
2. Nilai impor 2 digit HS, BPS
3. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
4. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
5. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
6. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
7. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non migas), BPS
8. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
9. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
10. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung, bergantung pada ketersediaan data di masing-masing daerah.

1. Metode Langsung

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sebagai berikut.

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai dengan jenis barang modal.

2. Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply → PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang × Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi → PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) × Indeks Produksi (t)

B.5 PERUBAHAN INVENTORI

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan ke dalam bentuk

barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut.

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
2. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
4. Barang setengah jadi, mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual.
6. Ternak untuk tujuan dipotong.
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan.
8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah sebagai berikut.

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS

3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS
5. Data komoditas perkebunan
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

Metode Penghitungan

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, bergantung pada jenis komoditasnya.

1. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori } (t) - \text{Volume inventori } (t-1) \times \text{Harga per unit}$$

$$PI \text{ atas dasar harga Konstan} = PI \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB$$

2. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$PI \text{ atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori } (t) \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB (t) - \text{Inventori } (t-1) \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB (t-1)$$

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = PI \text{ atas dasar harga Konstan} \times IHPB \text{ rata-rata } (t)$$

B.6 EKSPOR DAN IMPOR

Aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa makin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini makin mendorong aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah.

Konsep dan definisi

Ekspor impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Cakupan

Ekspor impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri atas a) ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota dan b) impor dari luar provinsi/kabupaten/kota. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Ekspor Neto.

Penghitungan Ekspor dan Impor Tahunan

Nilai ekspor impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Ekspor Neto. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada

data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Ekspor Neto kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Ekspor Neto menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

C. DISTRIBUSI/PERSENTASE PDRB

Sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (lapangan usaha dalam PDRB sektoral atau penggunaan) terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Distribusi/persentase PDRB menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDRB pada periode tertentu. Nilai ini diperoleh melalui rumus :

$$\text{Distribusi PDRB} = \frac{PDRB_i}{\Sigma PDRB} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_i$: Nominal PDRB atas dasar harga berlaku sektor ke-i

D. LAJU PERTUMBUHAN PDRB

Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDRB. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Adapun manfaat menghitung laju pertumbuhan PDRB suatu wilayah yaitu untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional; sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; serta sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. Nilai ini diperoleh melalui rumus :

$$\text{Laju pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{\Sigma PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$: Nominal PDRB tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$: Nominal PDRB tahun sebelumnya

E. INDEKS IMPLISIT

Suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi. Nilai ini diperoleh melalui rumus :

$$\text{Indeks Implisit} = \frac{PDRB_{HB}}{PDRB_{HK}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_{HB}$: PDRB atas dasar harga berlaku

$PDRB_{HK}$: PDRB atas dasar harga konstan

F. PDRB PER KAPITA

Merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Adapun manfaat dari penghitungan PDRB per kapita yaitu dapat menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Nilai ini diperoleh melalui rumus :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{PDRB}{\Sigma \text{penduduk}} \times 100\%$$

G. ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)

Metode yang didasarkan pada teori basis ekonomi untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tingkatan di atas daerah tersebut, dalam analisis ini pada tingkat provinsi. Metode ini menghitung perbandingan antara *share* output sektor-i di provinsi. *LQ* dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan *LQ* dari tahun ke tahun. Nilai ini dapat diperoleh melalui rumus :

$$LQ_i = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : output PDRB
 r : Kota Bontang
 n : Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam rumus di atas, maka terdapat tiga kemungkinan nilai *LQ* yaitu :

1. Nilai $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi/basis di lapangan usaha-i di Kota Bontang adalah sama dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nilai $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha-i di Kota Bontang lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.
3. Nilai $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha-i di Kota Bontang lebih kecil dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Apabila nilai $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa lapangan tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai pemicu pertumbuhan Kota Bontang. Sebaliknya, apabila nilai $LQ < 1$, maka lapangan usaha tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.

H. ANALISIS *SHIFT-SHARE*

Analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah dalam mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya. Metode ini dilakukan dengan cara menekankan pada pertumbuhan lapangan usaha di daerah dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau pada kali ini yaitu level provinsi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh lapangan usaha yang lamban pertumbuhannya maka perekonomian daerah tersebut akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

I. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Rasio Modal-Output Marginal (Incremental Capital Output Ratio – ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan capital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bias dicapai. Nilai ini dapat diperoleh melalui rumus :

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$$

Keterangan:

- I : Investasi
- ΔY : Perubahan output
- Y_t : Output pada tahun berjalan
- Y_{t-1} : Output pada tahun sebelumnya

Namun, pada kenyataannya investasi yang ditanamkan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan output yang diinginkan. Lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh output dari penanaman investasi yang dilakukan disebut lag. Dengan mempertimbangkan keberadaan lag dan ketersediaan data yang digunakan berupa data series, maka dilakukan penghitungan simple average (rata-rata sederhana) untuk memperoleh suatu nilai ICOR. Dalam publikasi ini akan dihitung ICOR lag 0, lag 1, lag 2, dan lag 3. Adapun rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai ini yaitu :

$$ICOR_1^r = \frac{1}{n} \sum_{t=t_1}^{t=t_2} \frac{I_t}{Y_{t+r} - Y_{t+r-1}}$$

Keterangan:

- I_t : Investasi (PMTB) pada tahun berjalan
- Y_t : PDRB atas dasar harga konstan pada tahun berjalan
- n : $t_2 - (t_1 - 1)$
- r : lag

Arti dari rumus di atas adalah investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menghasilkan output pada tahun ke-(t+r), dimana r merupakan time lag sampai investasi yang ditanamkan dapat memberikan tambahan output.

J. INCREMENTAL LABOUR OUTPUT RATIO- ILOR

Indikator yang digunakan untuk melihat keterkaitan PDRB dengan Ketenagakerjaan dan Kemiskinan adalah Rasio Tenaga Kerja – Output Marginal.

Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (Incremental Labour Output Ratio-ILOR) merupakan salah satu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan tenaga kerja baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ILOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan tenaga kerja dengan tambahan output.

Nilai ILOR menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap menurut laju pertumbuhan pendapatan/ekonominya di suatu wilayah pada periode tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai ini yaitu

$$ILOR = \frac{\Delta L / L_t}{\Delta Y / Y_t}$$

$$\Delta L = L_t - L_{t-1}$$

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$$

Dimana :

ΔL : Perubahan jumlah tenaga kerja dari tahun (t-1) ke tahun t

L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun berjalan

L_{t-1} : Jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya

ΔY : Perubahan pertumbuhan output dari tahun (t-1) ke tahun t

Y_t : Output pada tahun berjalan

Y_{t-1} : Output pada tahun sebelumnya

BAB III ANALISIS PEREKONOMIAN KOTA BONTANG

A. KONDISI EKONOMI

Di tahun 2017 perekonomian global mengalami pemulihan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat di lebih dari separuh perekonomian dunia. Perbaikan ini mencerminkan adanya kenaikan dalam investasi, aktivitas manufaktur, dan perdagangan. Perbaikan ekonomi global tersebut didorong oleh kondisi pembiayaan global yang longgar, kebijakan yang secara umum masih akomodatif, naiknya tingkat kepercayaan, dan menguatnya harga komoditas.

Pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung perlahan dan belum merata. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan ekspor komoditas yang selanjutnya mendorong peningkatan investasi nonbangunan, khususnya pada korporasi yang berbasis komoditas. Stimulus fiskal oleh pemerintah terkait pembangunan proyek infrastruktur juga mendorong investasi bangunan. Di sisi lain, investasi pada sektor-sektor nonkomoditas belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh terbatas khususnya pada belanja makanan dan pakaian disertai pergeseran pola konsumsi ke *leisure*, serta terjadi preferensi untuk menunda konsumsi pada masyarakat golongan menengah atas.

Dinamika ekonomi makro di tingkat global, nasional, maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Timur secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kondisi perekonomian Kota Bontang. Perekonomian Kota Bontang berangsur pulih, setelah mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2016 lalu, laju pertumbuhan Kota Bontang kembali tumbuh positif di tahun 2016. Walaupun menurunnya kinerja beberapa perusahaan yang aktivitas produksinya berorientasi ekspor dan menjadi nadi pergerakan ekonomi Kota Bontang, seperti gas alam cair (LNG), Amonia, dan pupuk Urea, namun lapangan usaha lain mulai membaik sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sepanjang tahun

2017 terindikasi meningkat sebesar 0,68 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor neto menjadi penyangga pertumbuhan di tengah penurunan yang terjadi pada komponen pengeluaran lainnya.

A.1 INDEKS PERKEMBANGAN

Indeks Perkembangan adalah suatu indeks yang menggambarkan perkembangan angka PDRB yang dibandingkan dengan tahun dasar. Nilai ini diperoleh dari pembagian nilai PDRB pada suatu tahun-t dengan PDRB tahun 2010 (tahun dasar). Semakin besar angka suatu lapangan usaha berarti perkembangan lapangan usaha tersebut semakin cepat dan berlaku sebaliknya. Indeks Perkembangan PDRB Kota Bontang pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 108,35 persen yaitu menjadi 56,28 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 1,04 kali lipat dari tahun dasar (tahun 2010). Sementara itu, Indeks Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 tercatat sebesar 79,27 persen yaitu menjadi 43,13 triliun rupiah. Nilai ini menurun 0,79 kali dari tahun dasar.

Tabel 3.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Tahun 2013-2017.

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	56.278.078,73	103,72	43.012.336,35	79,27
2014	59.055.313,39	108,84	41.622.133,43	76,71
2015	58.600.855,04	108,00	43.437.183,63	80,06
2016 ^{*)}	55.233.873,65	101,80	42.836.359,11	78,95
2017 ^{**)}	58.787.632,05	108,35	43.128.297,41	79,49

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2017, lapangan usaha yang mengalami perkembangan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan angka indeks sebesar 315,82 persen atau meningkat 3,16 kali dibandingkan tahun dasar menjadi sebesar 513,59 miliar rupiah. Kemudian, disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan angka indeks 296,35 atau meningkat 2,96 kali dibandingkan tahun dasar menjadi sebesar 16,18 miliar rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya, perkembangan tertinggi yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan angka indeks sebesar 293,09 persen atau meningkat 2,93 kali dibandingkan tahun dasar yaitu menjadi 563,78 miliar rupiah. Sementara itu, Indeks Perkembangan terendah adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tercatat 41,52 persen.

Untuk harga konstan, pada tahun 2017 lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tercatat memiliki Indeks Perkembangan tertinggi, yang tercatat sebesar 250,72 persen atau meningkat 2,51 kali dibandingkan produksi pada tahun dasar. Nilai pada tahun 2017 mencapai 13,68 miliar rupiah, sedangkan tahun 2010 hanya 5,46 miliar rupiah. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tercatat memiliki Indeks Perkembangan sebesar 219,61 persen atau meningkat 2,19 kali dibanding kondisi pada tahun dasar. Nilai lapangan usaha ini pada tahun 2017 mencapai 357,14 miliar rupiah, sedangkan tahun 2010 hanya 162,62 miliar rupiah. Sementara itu, Indeks Perkembangan terendah yaitu sama dengan harga berlakunya, yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 37,91 persen. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang paling lambat perkembangannya dari enam belas lapangan usaha lainnya pada kondisi tahun 2017 dibandingkan kondisi tahun dasar (tahun 2010).

A.2 INDEKS BERANTAI

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per lapangan usaha yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum, nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan

nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dikali 100. Apabila indeks berantai ini dikurangi 100, maka dapat dikatakan sebagai laju pertumbuhan. Pada Tabel 3.2. berikut disajikan Indeks Berantai PDRB Kota Bontang tahun 2013-2017.

Tabel 3.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Tahun 2013-2017.

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rupiah)	Indeks Berantai (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Indeks Berantai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	56.278.078,73	103.24	43.012.336,35	94.28
2014	59.055.313,39	104.93	41.622.133,43	96.77
2015	58.600.855,04	99.23	43.437.183,63	104.36
2016 ^{*)}	55.233.873,65	94.25	42.836.359,11	98.62
2017 ^{**)}	58.787.632,05	106.43	43.128.297,41	100.68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indeks Berantai menurut harga berlaku diperoleh dengan cara membagi Nilai Tambah (NTB) atas dasar harga berlaku tahun ke-t dengan NTB atas dasar harga berlaku tahun ke-(t-1). Nilai Indeks Berantai menurut harga berlaku ini menggambarkan besarnya perkembangan agregat atau sektoral yang dikarenakan adanya perkembangan harga dan produksi. Sementara itu, Indeks berantai atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi NTB atas dasar harga konstan pada tahun ke-t dengan NTB atas dasar harga konstan pada tahun ke-(t-1). Pergerakan indeks ini mencerminkan perkembangan nilai riil produksi masing-masing lapangan usaha.

Untuk harga berlaku, indeks berantai PDRB Kota Bontang tahun 2017 adalah sebesar 106,43 persen. Indeks Berantai tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 142,21 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya Indeks Berantai pada lapangan usaha ini sangat rendah

yaitu mencapai 41,91 atau tumbuh sangat negatif. Adapun sumber data lapangan usaha ini diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar 123,48 persen; serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 117,98 persen.

Sedangkan menurut harga konstan, Indeks Berantai PDRB Kota Bontang tercatat 100,68 persen. Adapun lapangan usaha dengan Indeks Berantai tertinggi yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan, yaitu sebesar 111,69 persen. Kemudian, diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 111,68 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 108,81 persen. Sementara itu, Indeks Berantai terkecil pada tahun 2017 dimiliki oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu sebesar 99,11 persen atau menurun menjadi 0,99 kali dari tahun 2016.

A.3 INDEKS HARGA IMPLISIT

Dalam pembangunan ekonomi, masalah tingkat harga merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi tidak akan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat jika tingkat harga meningkat lebih tinggi. Dengan berkembangnya perekonomian berarti semua komponen nilai tambah, termasuk upah dan gaji sebagai balas jasa faktor produksi tenaga kerja akan mengalami kenaikan serta keuntungan pengusaha juga akan meningkat. Dengan harga barang yang relatif stabil, maka kenaikan daya beli dapat terjadi. Kenaikan daya beli tersebut kemudian membantu peraikan kesejahteraan.

Indeks Harga Implisit (IHI) diperoleh melalui pembagian nilai PDRB atas dasar harga berlaku oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing sektor/subsektor dalam waktu satu tahun dikalikan 100. Indeks harga implisit ini menggambarkan tingkat perubahan harga umum seluruh komoditi baik barang maupun jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Namun demikian, Indeks Harga Implisit ini memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa

dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Berbeda dengan IHK, Indeks Harga Implisit menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen.

Tabel 3.3. Indeks Harga Implisit dan Perubahannya Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dengan Migas					
Indeks Implisit	130.84	141.88	134.91	128.94	136.31
Perubahan IHI (%)	9.51	8.44	-4.92	-4.42	5.71
Tanpa Migas					
Indeks Implisit	125.48	123.07	132.04	136.16	139.43
Perubahan IHI (%)	7.81	-1.93	7.29	3.12	2.40

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dari perhitungan indeks implisit PDRB, selama kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kota Bontang mengalami pergerakan yang cukup berfluktuasi yaitu pada kisaran 9,51 persen di tahun 2013 sampai -4,92 persen di tahun 2015 seperti terlihat pada tabel di atas. Perubahan nilai uang tahun 2017 tercatat sebesar 5,71 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mengalami penurunan -4,42 persen. Perubahan nilai uang selama lima tahun terakhir yang besarnya satu digit menandakan perekonomian Kota Bontang bergerak secara lebih dinamis dan memberikan ekspektasi yang menggembirakan bagi pelaku ekonomi.

B. TINJAUAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 58,78 triliun rupiah. Secara nominal, nilai ini mengalami peningkatan 3,55 triliun rupiah dibandingkan tahun 2016. Selain dipengaruhi peningkatan produksi di lapangan usaha, peningkatan nilai PDRB tersebut juga dipengaruhi adanya inflasi.

Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bontang juga mengalami peningkatan dari 42,84 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 43,13 triliun rupiah pada tahun 2017. Dengan kata lain, ekonomi Kota Bontang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,68 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan peningkatan produksi tanpa dipengaruhi faktor inflasi.

B.1 STRUKTUR EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA

B.1.1 Dengan Migas

Struktur ekonomi suatu wilayah memberikan gambaran umum mengenai komposisi lapangan usaha yang mempengaruhi perekonomian wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Dalam jangka panjang dapat terjadi pergeseran struktur perekonomian yang cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti perubahan ketersediaan sumber daya, target pasar, situasi politik dan lain-lain. Lapangan usaha yang memiliki peranan lebih tinggi dibandingkan lapangan usaha lain dalam struktur ekonomi suatu wilayah dapat disebut sebagai lapangan usaha utama (*leading sector*).

Kota Bontang merupakan salah satu kota yang memiliki beberapa industri besar. Oleh karena itu tidak salah jika struktur ekonomi Kota Bontang didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi mencapai 83,95 persen pada tahun 2017. Jika diamati lebih lanjut, struktur ekonomi Kota Bontang selama periode 2013-2017 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lapangan usaha tersebut konsisten memberikan kontribusi di atas 80 persen meskipun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2013, kontribusi Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 85,41 persen. Pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan menjadi 85,55 persen. Sejak tahun 2015 hingga 2017, kontribusi Industri Pengolahan sedikit demi sedikit mengalami penurunan menjadi 83,95 persen pada tahun 2017. Adapun subkategori yang

mendominasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Bontang selama lima tahun terakhir adalah Industri Pengilangan migas yaitu berkisar 64,5 sampai dengan 72,8 persen dari total nilai Industri Pengolahan. Tabel 3.4. di bawah ini menunjukkan kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam membentuk PDRB Kota Bontang selama periode 2013-2017.

Tabel 3.4. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.65	0.77	0.88	0.87	0.96
B Pertambangan dan Penggalian	2.55	1.89	1.38	0.62	0.82
C Industri Pengolahan	85.41	85.55	85.05	84.43	83.95
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
F Konstruksi	3.96	4.08	4.31	4.69	4.91
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.10	2.16	2.32	2.54	2.50
H Transportasi dan Pergudangan	0.98	1.00	1.06	1.19	1.19
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.33	0.34	0.38	0.41	0.44
J Informasi dan Komunikasi	0.57	0.59	0.63	0.71	0.68
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.64	0.66	0.67	0.72	0.68
L Real Estat	0.33	0.34	0.36	0.40	0.40
M,N Jasa Perusahaan	0.34	0.36	0.37	0.39	0.39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.95	0.99	1.12	1.30	1.26
P Jasa Pendidikan	0.58	0.63	0.72	0.84	0.87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.41	0.43	0.49	0.57	0.58
R,S, T,U Jasa Lainnya	0.19	0.20	0.23	0.28	0.31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

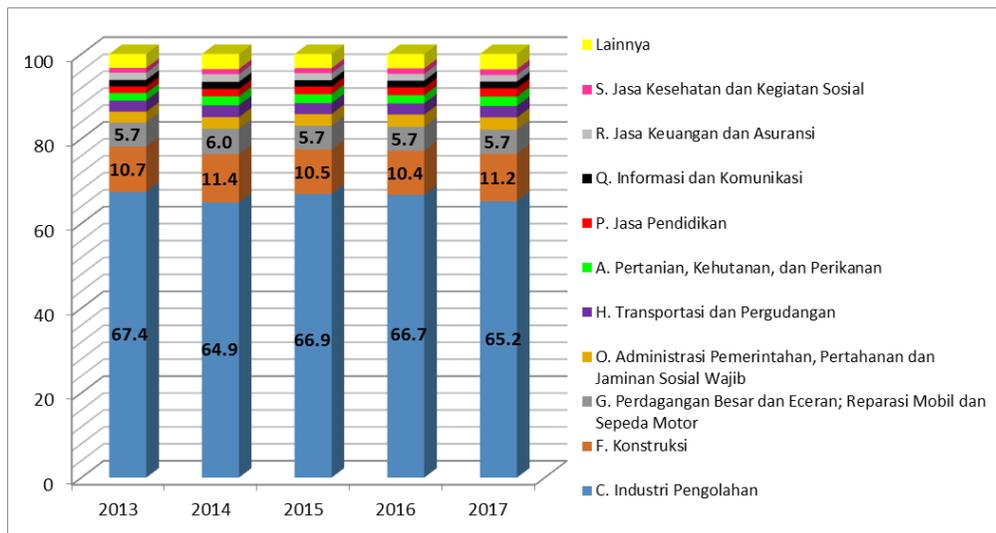
***) Angka Sangat Sementara

B.1.2 Tanpa Migas

Dengan dikeluarkannya faktor minyak dan gas dari perhitungan, maka dapat diperoleh nilai PDRB tanpa migas. Pada Tahun 2017 nilai PDRB tanpa migas menurut harga berlaku Kota Bontang mencapai 25,75 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan 0,94 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,81 triliun rupiah. Dari total nilai PDRB PDRB tanpa migas Kota Bontang, sumbangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan mencapai 65,23 persen dari total PDRB tanpa migas. Bahkan, lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir mampu memberikan kontribusi konsisten di atas 65 persen terhadap PDRB tanpa migas Kota Bontang. Pengaruh kuat lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Bontang tidak terlepas dari keberadaan industri pupuk maupun bahan kimia lainnya.

Sebagai industri berskala besar, hasil pendapatannya hanya dinikmati oleh sebagian lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan hasil Sensus Ekonomi 2016, hanya 16,96 persen tenaga kerja di Kota Bontang yang bekerja di Lapangan Usaha Industri Pengolahan baik dalam skala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Padahal, pada tahun 2016 sebesar 63,53 persen dari total 59.501 tenaga kerja di Kota Bontang bekerja di UMK. Oleh karena itu diperlukan peningkatan lapangan usaha lain agar semakin merata dinikmati berbagai lapisan masyarakat. Adapun lapangan usaha pada Gambar 3.1 yang memiliki kontribusi 10 besar dalam perekonomian tanpa migas setelah Industri Pengolahan yaitu F (Konstruksi); G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor); O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib); H (transportasi dan Pergudangan); A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan); P (Jasa Pendidikan); Q (Informasi dan Komunikasi); R (Jasa Keuangan dan Asuransi); serta S (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial).

Grafik 3.1. Struktur Ekonomi Kota Bontang Tanpa Migas Tahun 2013-2017 (Persen)



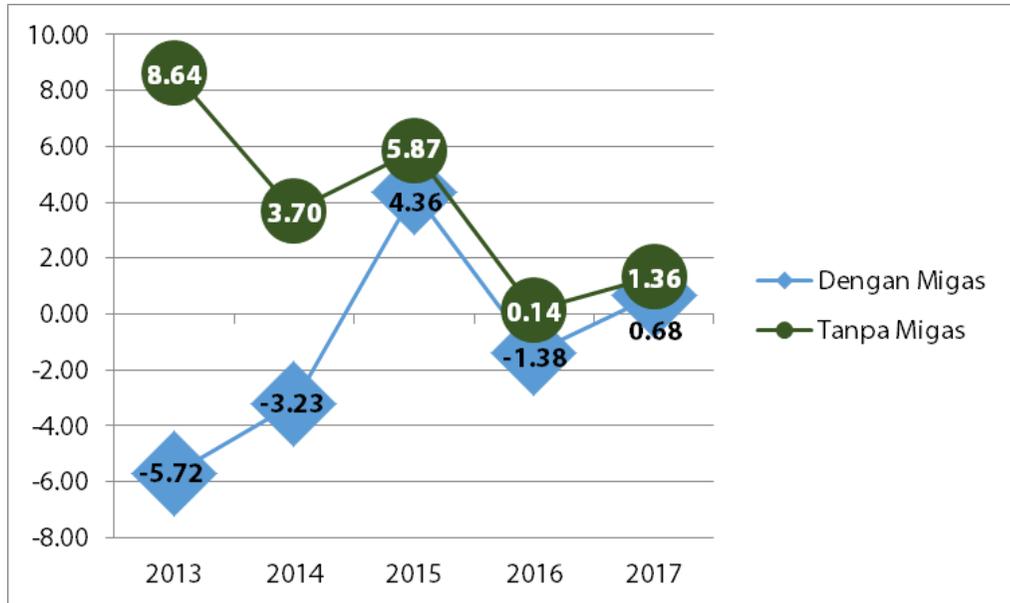
B.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA

Secara makro, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan produksi seluruh barang dan jasa pada suatu wilayah dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan produksi seluruh barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa. Penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi diturunkan dari angka PDRB atas dasar harga konstan wilayah bersangkutan.

Ekonomi Kota Bontang mulai tumbuh positif setelah mengalami penurunan pada beberapa periode sebelumnya. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kota Bontang atas dasar Harga Konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara total mengalami laju pertumbuhan negatif (menurun) hampir setiap tahunnya selama periode 2013-2016. Secara total, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2017 bernilai positif sebesar 0,68 persen. Hal serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang juga mengalami peningkatan 1,36 persen, sedikit lebih cepat dibanding tahun 2016 yang sebesar 0,14 persen. Laju

pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat terlihat pada Grafik 3.2. di bawah ini:

Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bontang Tahun 2013-2017 (persen)



Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dapat terlihat dengan jelas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan migas dan tanpa migas seperti pada Grafik 3.2. di atas. Dari pendekatan PDRB dengan migas terlihat ada kecenderungan mengalami negatif. Sebaliknya, melalui pendekatan PDRB tanpa migas terlihat ada kecenderungan selalu positif. Pertumbuhan pada PDRB dengan migas yang negatif merupakan salah satu indikator produksi gas alam cair di Kota Bontang yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan total produksi tersebut berdampak pada perekonomian Kota Bontang yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2002. Turunnya total produksi tersebut berdampak pada perekonomian Kota Bontang yang masih bertumpu salah satunya pada hasil industri pengolahan gas alam cair. Selain itu, sumber baru sebagai pemasok bahan baku LNG di Kota Bontang juga baru ditemukan pada akhir tahun 2017, yaitu dari lapangan migas Jangkrik yang dikelola oleh PT. Eni Indonesia.

Berbeda dengan pertumbuhan PDRB dengan migas yang seringkali bernilai negatif, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tanpa migas bernilai positif dari tahun ke tahun. Apabila dilihat berdasarkan atas harga produsen secara konstan Tahun 2010, maka pertumbuhan PDRB tanpa migas Kota Bontang Tahun 2017 mencapai 1,36 persen (riil) tanpa mengandung unsur inflasi. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,14 persen. Perkembangan perekonomian tanpa migas yang terus positif diharapkan mampu menggerakkan ekonomi Kota Bontang agar tidak terus menerus bertumpu pada sektor migas yang tidak dapat diperbaharui sumbernya.

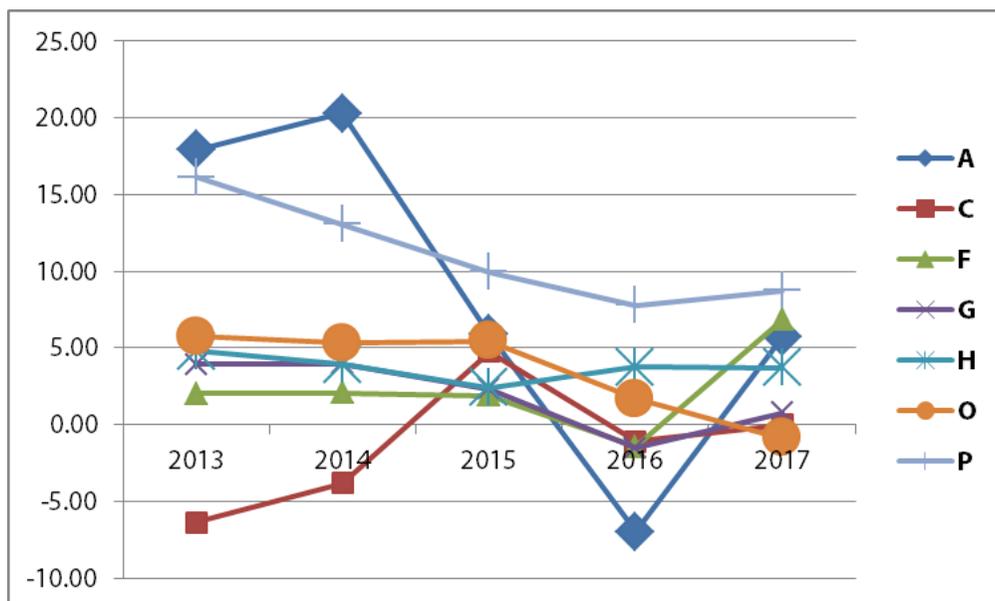
Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2017, hanya empat lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu C (Industri Pengolahan) sebesar -0,01 persen; J (Informasi dan Komunikasi) sebesar -0,05 persen; K (Jasa Keuangan dan Asuransi) sebesar -1,92 persen; dan O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar -0,89 persen. Sementara itu, tiga belas lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi positif dalam perekonomian Kota Bontang. Adapun beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi positif besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dan memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu F (Konstruksi); P (Jasa Pendidikan); A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan); serta H (Transportasi dan Pergudangan).

B.3 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

B.3.1 Lapangan Usaha Dengan Kontribusi Terbesar

PDRB menurut Lapangan Usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bontang:

Grafik 3.3. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kota Bontang
Tahun 2013-2017



Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang. Lapangan usaha ini konsisten memberi kontribusi lebih dari 80 persen sejak dari tahun 2010. Meskipun kontribusi tersebut cenderung menurun setiap tahun, namun pada tahun 2017 masih mencapai 83,95 persen pada tahun 2017. Dua industri besar yaitu pengolahan gas alam cair (LNG) dan pupuk memiliki peran besar dalam Industri Pengolahan Kota Bontang. Lapangan usaha ini dibagi menjadi dua subkategori yaitu Subkategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas serta Subkategori Industri Non Migas dan Batubara. Pada Tahun 2013-2017, nilai tambah bruto yang dihasilkan Subkategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas cenderung mengalami penurunan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah bruto Industri Pengolahan. Salah satu sebab menurunnya kontribusi subkategori tersebut adalah menurunnya harga minyak dunia. Sebaliknya, Subkategori Industri Non Migas dan Batubara mengalami peningkatan peranan. Salah satu industri yang terus tumbuh perlahan dalam subsektor ini yaitu Industri Makanan dan

Minuman misalnya usaha pembuatan empek-empek, terasi, pengolahan rumput laut kering, dan lain-lain.

Besar kontribusi Lapangan Usaha Konstruksi (Kategori F) terhadap pembentukan nilai PDRB Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tercatat lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 4,91 persen, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,69 persen. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan ini diantaranya pembangunan jaringan gas kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), kawasan wisata mangrove, serta pembangunan lain yang sedang berjalan di Kota Bontang. Kegiatan lain yang juga dapat dikategorikan dalam lapangan usaha ini dapat berupa konstruksi gedung tempat tinggal, perkantoran, bangunan pabrik, jalan, jembatan, dan termasuk pula konstruksi jaringan pipa listrik, serta pembongkaran dan penyiapan lahan.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dipengaruhi bukan saja oleh perdagangan barang-barang domestik yang diproduksi di Kota Bontang, namun dipengaruhi pula oleh perdagangan barang-barang impor yang masuk ke Bontang, baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain di luar Kota Bontang. Pada tahun 2017, lapangan usaha ini didominasi oleh kontribusi Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 85,48 persen. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2017 tercatat positif sebesar 0,78 persen setelah mengalami penurunan pada periode sebelumnya yaitu -1,54 persen. Lapangan usaha ini berperan sebagai perantara kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Kota Bontang yang meningkat 2,41 persen pada tahun 2017. Peningkatan aktivitas ekonomi lapangan usaha ini juga secara tidak langsung dipengaruhi aktivitas ekonomi wilayah di sekitar Kota Bontang. Misalnya ketika terjadi peningkatan pendapatan di wilayah sekitar Kota Bontang, secara tidak langsung dapat meningkatkan arus perdagangan antar wilayah tersebut dengan Kota Bontang.

Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O) dalam struktur perekonomian Kota Bontang menduduki posisi yang cukup tinggi. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 1,26 terhadap PDRB Kota Bontang atau meningkat ke peringkat keempat di tahun 2016 dan 2017, setelah sebelumnya menduduki peringkat keenam pada tahun 2013-2014 dan kelima pada tahun 2015. Peningkatan posisi kategori ini dalam struktur perekonomian Kota Bontang dapat diartikan bahwa ketergantungan denyut ekonomi Kota Bontang terhadap aktivitas pemerintahan semakin besar. Dalam jangka panjang, hal ini kurang menguntungkan bagi Kota Bontang karena perekonomian masyarakat dapat langsung terpukul apabila terjadi defisit anggaran. Namun, peningkatan kontribusi ini tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan lapangan usaha ini. Tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar -0,89 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 1,68 persen.

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Kategori H) merupakan salah satu penunjang penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Pertumbuhan lapangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kontribusi lapangan usaha ini dalam PDRB menempati urutan ke lima dalam struktur perekonomian Kota Bontang. Adapun perkembangan laju pertumbuhan kategori ini selama lima tahun terakhir dapat terlihat pada Gambar 3.3. Pada tahun 2017 tercatat aktivitas ekonomi lapangan usaha ini dapat tumbuh sebesar 3,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Kota Bontang, aktivitas lapangan usaha ini utamanya berupa subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir; Angkutan Laut; serta Angkutan Darat.

Pada tahun 2017 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A) memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kota Bontang sebesar 0,96 persen atau berada pada posisi keenam di dalam struktur perekonomian Kota Bontang tahun 2017. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut (Selat Makassar) menyebabkan Subkategori Perikanan berkontribusi besar dalam kegiatan perekonomian yang berbasis hasil alam ini. Tercatat kontribusi

subsektori ini terhadap Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 91,48 persen. Beberapa komoditas utama hasil kegiatan perikanan di Kota Bontang adalah ikan layang, baronang, cakalang, tongkol, dan rumput laut. Adapun laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha ini sebesar 5,69 persen, berbalik arah dari laju pertumbuhan di tahun 2016 yang sebesar -7,00 persen. Hal ini terjadi utamanya karena peningkatan produksi pada Subkategori Perikanan yang meningkat sebesar 6,24 persen. Peningkatan produksi perikanan didukung oleh kondisi cuaca yang lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga risiko rumput laut yang rentan terkena penyakit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya serta peningkatan produksi pada beberapa jenis ikan. Selain itu, peningkatan produksi juga terjadi pada Subkategori Pertanian, Peternakan, dan Jasa Pertanian pada tahun 2017 sebesar 2,37 persen. Peningkatan ini terjadi salah satunya karena beberapa lahan yang terserang hama pada periode sebelumnya berhasil dipanen pada periode 2017.

Kategori Jasa Pendidikan (Kategori P) meliputi kegiatan pendidikan di berbagai tingkatan, baik formal maupun non formal, dan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2017 kategori ini mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 513,59 miliar, naik sekitar 48,88 miliar rupiah dibandingkan tahun 2016. Nilai tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,87 persen terhadap perekonomian Kota Bontang dan 1,99 persen terhadap perekonomian Kota Bontang tanpa migas. Lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,73 persen pada tahun 2017, sedikit lebih cepat dibanding tahun 2016 yang sebesar 7,79 persen. Ketersediaan sarana pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan lapangan usaha ini. Jumlah sekolah di Kota Bontang tahun 2017 tercatat sebanyak 122 unit yang terdiri atas 61 unit SD/MI, 35 unit SMP/MTs, dan 26 unit SMA/SMK/MA. Jumlah murid dan guru secara keseluruhan adalah 37.792 murid dan 2.324 guru. Sedangkan, untuk TK/RA jumlahnya 63 unit dengan jumlah murid dan guru masing-masing 5.185 murid dan 496 guru. Selain itu, di Kota Bontang terdapat 4 perguruan tinggi yang dikelola pihak swasta.

B.3.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk melihat lapangan usaha yang memiliki peran yang besar serta prospektif untuk dikembangkan sebagai sektor basis di Kota Bontang. Analisis *LQ* termasuk analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan relatif Kota Bontang terhadap Provinsi Kalimantan Timur dalam sektor tertentu.

B.3.2.1 Analisis LQ dengan Migas

Tabel 3.5. menunjukkan indeks *LQ* lapangan usaha dengan migas di Kota Bontang. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan masing-masing memiliki rata-rata nilai *LQ* 4,13 dan 2,33. Hal ini menjadikan kedua lapangan usaha tersebut sebagai sektor basis ($LQ > 1$) di Kota Bontang. Tingkat spesialisasi/basis kedua lapangan usaha tersebut lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, lapangan usaha tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hasil produksi lapangan usaha ini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di Kota Bontang, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Bontang. Ekspor produksi Industri Pengolahan di Kota Bontang dimotori oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengekspor LNG, pupuk, amoniak, dan beberapa produk lain dengan nilai dan kuantitas yang besar ke luar wilayah Kota Bontang bahkan ada yang ke luar wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk lapangan usaha Jasa Perusahaan di Kota Bontang dimotori oleh Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N). Kategori ini meliputi aktivitas penyewaan; aktivitas ketenagakerjaan; aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya; aktivitas keamanan dan penyelidikan; aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan; serta aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya. Kedua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis ini jika dikembangkan memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Bontang.

Pada Tabel 3.5. juga terlihat lapangan usaha yang bukan termasuk sektor basis ($LQ \leq 1$). Dari lima belas lapangan usaha yang tersisa hanya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki $LQ=1$ yaitu tepatnya 1,01. Hal ini menunjukkan tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha tersebut di Kota Bontang sama dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Lapangan usaha tersebut belum mampu mengekspor ke luar wilayah Kota Bontang, namun lapangan usaha tersebut secara garis besar mampu memenuhi kebutuhan intern Kota Bontang. Hal ini didukung tersedianya beberapa fasilitas kesehatan di Kota Bontang seperti rumah sakit, klinik, apotek, tenaga medis dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, empat belas lapangan usaha yang lain memiliki nilai $LQ < 1$. Hal ini berarti bahwa tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha ini di Kota Bontang lebih kecil dibandingkan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, produksi dari tiga belas lapangan usaha ini belum dapat memenuhi kebutuhan di Kota Bontang, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah Kota Bontang. Meskipun lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, peran lapangan usaha yang bukan termasuk sektor basis tidak dapat diabaikan begitu saja karena dengan kebijakan yang tepat sangat mungkin lapangan usaha ini dapat menjadi sektor basis yang baru.

**Tabel 3.5. Indeks LQ Lapangan Usaha dengan Migas di Kota Bontang
Tahun 2013-2017**

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)	2017 **)	Rata -rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13
B	Pertambangan dan Penggalian	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
C	Industri Pengolahan	4.29	4.32	4.17	3.95	3.91	4.13

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)	Rata -rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.42	0.43	0.42	0.42	0.44	0.43
F	Konstruksi	0.68	0.69	0.67	0.69	0.71	0.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.51	0.53	0.50	0.49	0.47	0.50
H	Transportasi dan Pergudangan	0.46	0.47	0.45	0.45	0.45	0.46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.54	0.55	0.50	0.47	0.48	0.51
J	Informasi dan Komunikasi	0.62	0.65	0.60	0.60	0.57	0.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.49	0.52	0.48	0.48	0.48	0.49
L	Real Estat	0.49	0.49	0.47	0.49	0.49	0.49
M,N	Jasa Perusahaan	2.19	2.31	2.33	2.40	2.43	2.33
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.58	0.59	0.57	0.60	0.61	0.59
O	Jasa Pendidikan	0.56	0.59	0.56	0.57	0.59	0.57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.05	1.09	0.97	0.97	0.98	1.01
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0.56	0.58	0.53	0.52	0.54	0.55

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

B.3.2.2 Analisis LQ tanpa Migas

Tabel 3.5. menunjukkan indeks *LQ* lapangan usaha tanpa migas di Kota Bontang. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lapangan usaha yang memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ yaitu Industri Pengolahan (7,77); Konstruksi (1,25); Informasi dan Komunikasi (1,10); Jasa Perusahaan (4,23); serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,84). Hal ini menjadikan kelima lapangan usaha tersebut sebagai sektor basis di Kota Bontang. Tingkat spesialisasi/ basis kelima lapangan usaha tersebut

lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, lapangan usaha tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hasil produksi lapangan usaha ini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di Kota Bontang, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Bontang. Meskipun pengaruh komponen migas sudah dihilangkan dari perhitungan, ekspor produksi Industri Pengolahan masih dimotori oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengekspor pupuk, amoniak, dan beberapa produk lain dengan nilai dan kuantitas yang besar ke luar wilayah Kota Bontang bahkan ada yang ke luar negeri. Sebagai kota yang berkembang, beberapa pembangunan juga terjadi di Kota Bontang selama lima tahun terakhir, salah satunya pembangunan jaringan gas kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan pasar, pembangunan rusun, dan lain-lain. Perkembangan ini menjadikan lapangan usaha konstruksi juga menjadi salah satu lapangan usaha yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, keberadaan lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebagai sektor basis di Kota Bontang mengindikasikan cukup tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi seperti informasi dalam bentuk digital maupun cetak, serta komunikasi baik suara, teks, gambar, hingga gambar bergerak. Di sisi lain, provider juga menyambut antusiasme masyarakat Kota Bontang dengan penyediaan tariff yang bersaing.

Pada Tabel 3.6. juga terlihat lapangan usaha yang bukan termasuk sektor basis ($LQ \leq 1$). Dari dua belas lapangan usaha yang tersisa hanya lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan yang memiliki $LQ=1$ yaitu tepatnya masing-masing 1,09; 1,07; dan 1,04. Hal ini menunjukkan tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha tersebut di Kota Bontang sama dengan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Lapangan usaha tersebut belum mampu mengekspor ke luar wilayah Kota Bontang, namun lapangan usaha tersebut secara garis besar mampu memenuhi kebutuhan intern Kota Bontang. Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Bontang dapat dikatakan cukup memadai

dikarenakan keberadaan BUMN, BUMD, dan swasta yang turut hadir membantu penyediaan listrik dan gas di Kota Bontang. Selanjutnya, ketersediaan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat Kota Bontang. Hal ini didukung keberadaan fasilitas-fasilitas pelayanan pemerintah seperti kantor dinas, kantor-kantor pelayanan publik, perpustakaan kota, serta para pegawai pemerintahan baik pusat maupun daerah yang bertugas melaksanakan program/kebijakan pemerintah dan melayani masyarakat Kota Bontang. Berbeda dengan tiga lapangan usaha yang memiliki $LQ=1$, sembilan lapangan usaha yang lain memiliki nilai $LQ<1$. Hal ini berarti bahwa tingkat spesialisasi/basis lapangan usaha ini di Kota Bontang lebih kecil dibandingkan lapangan usaha yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, produksi dari sembilan lapangan usaha ini belum dapat memenuhi kebutuhan di Kota Bontang, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah Kota Bontang. Meskipun lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, peran lapangan usaha yang bukan termasuk sektor basis tidak dapat diabaikan begitu saja karena dengan kebijakan yang tepat sangat mungkin lapangan usaha ini dapat menjadi sektor basis yang baru.

**Tabel 3.6. Indeks LQ Lapangan Usaha tanpa Migas Kota Bontang
Tahun 2013-2017**

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)	2017 **)	Rata -rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.23	0.26	0.24	0.22	0.23	0.23
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	8.15	8.23	7.71	7.36	7.38	7.77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.15	1.13	1.08	1.05	1.06	1.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.81	0.80	0.75	0.74	0.78	0.78

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)	2017 **)	Rata -rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F	Konstruksi	1.32	1.27	1.21	1.22	1.24	1.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.98	0.97	0.91	0.86	0.83	0.91
H	Transportasi dan Pergudangan	0.90	0.87	0.81	0.80	0.79	0.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.04	1.02	0.90	0.83	0.85	0.93
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	1.19	1.09	1.06	1.00	1.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.95	0.95	0.87	0.84	0.85	0.89
L	Real Estat	0.95	0.91	0.84	0.87	0.87	0.89
M, N	Jasa Perusahaan	4.23	4.24	4.20	4.22	4.28	4.23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.12	1.08	1.02	1.06	1.08	1.07
P	Jasa Pendidikan	1.07	1.08	1.01	1.00	1.03	1.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.02	2.00	1.75	1.70	1.73	1.84
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1.07	1.07	0.96	0.92	0.95	0.99

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

C. TINJAUAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun adalah PDRB menurut pengeluaran disamping PDRB menurut lapangan usaha yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran Kota Bontang, dapat dilihat bagaimana struktur perekonomian kota Bontang, laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang, perkembangan kondisi perekonomian secara nominal dan riil dari tahun ke tahun.

C.1 STRUKTUR EKONOMI MENURUT PENGELUARAN

Struktur perekonomian Kota Bontang dipandang dari sudut pengeluaran sangat didominasi komponen ekspor neto, hal ini tidak terlepas pengaruh keberadaan perusahaan gas alam cair (LNG). Meskipun penggunaan barang dan jasa yang berasal dari impor juga relatif besar. Namun demikian, neraca perdagangan Kota Bontang masih mengalami surplus dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 peran ekspor neto terhadap perekonomian Kota Bontang adalah sekitar 76,45 persen dari nilai PDRB. Nilai kontribusi tersebut mengalami fluktuasi sepanjang periode 2013-2017, dimana terjadi penurunan nilai kontribusi menjadi sebesar 74,28 persen di tahun 2014 dan kembali naik perlahan ke posisi 78,26 persen pada tahun 2017.

Peran investasi (komponen pembentukan modal tetap bruto - PMTB) menduduki peringkat kedua setelah ekspor neto pada struktur perekonomian Kota Bontang. Peran peningkatan investasi memberikan dampak ganda yaitu meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih

mudah dan murah. Di sisi lain, percepatan tersebut juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Investasi dapat menjadi pendorong pergerakan roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. Dalam situasi ini, pengusaha mendapat keuntungan yang memadai untuk melakukan penambahan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan melakukan ekspansi usaha. Bagi tenaga kerja, dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki upah yang diterima. Kenaikan upah diharapkan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi namun juga meningkatkan kemampuan menabung dan/atau berinvestasi. Bagi pemerintah, meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan serta upah dan daya beli adalah berarti meningkatnya penerimaan pajak, yang efek jangka panjangnya adalah memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

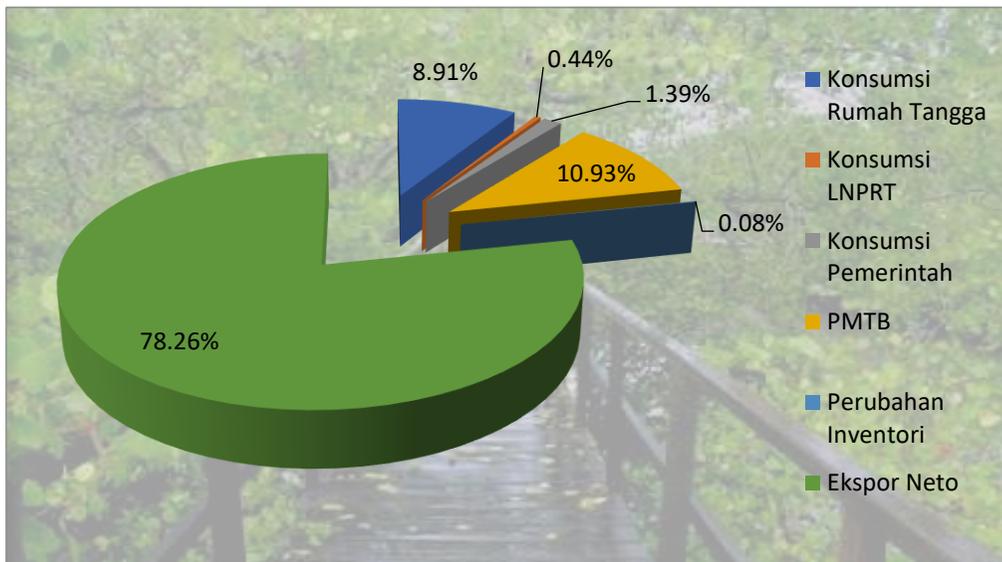
Komponen investasi (pembentukan modal tetap bruto - PMTB) masih cukup dominan di Kota Bontang. Pada tahun 2013 peran PMTB terhadap pembentukan nilai nominal PDRB Kota Bontang adalah sebesar 12,75 persen dan terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi sekitar 13,39 persen. Pada tahun 2016 nilai kontribusi komponen PMTB tersebut sempat turun menjadi sekitar 10,50 persen, namun perlahan naik di tahun 2017 menjadi 10,93 persen. Peningkatan peranan komponen PMTB yang merupakan bagian dari kegiatan investasi beriringan dengan makin turunnya porsi aktivitas konsumsi akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) di dalam perekonomian Kota Bontang.

Sementara peringkat ketiga pada struktur perekonomian Kota Bontang ditempati komponen konsumsi rumah tangga. Peran konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB makin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 155.880 jiwa.

Jumlah tersebut terus meningkat hingga menjadi sekitar 170.670 jiwa pada tahun 2017. Pada tahun 2013 peran komponen konsumsi rumah tangga adalah sekitar 7,04 persen terhadap nilai PDRB Kota Bontang. Nilai peranan tersebut terus meningkat hingga menjadi sekitar 8,91 persen pada tahun 2017. Dalam hal ini, suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cenderung didorong oleh konsumsi akhir akan sulit dijaga keberlangsungan dan kestabilannya. Pertumbuhan ekonomi daerah seperti itu dapat dikatakan bukanlah struktur perekonomian daerah yang kuat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi akan kurang menciptakan nilai tambah dan memicu peningkatan inflasi. Dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, perekonomian daerah perlu didukung oleh kegiatan investasi di sektor produktif dan jasa, yang pada gilirannya akan memicu penciptaan nilai tambah yang lebih besar dan peningkatan nilai ekspor, baik ke luar negeri maupun ke luar daerah.

Dalam kurun waktu empat tahun mulai tahun 2013-2016, kontribusi aktivitas konsumsi akhir terhadap PDRB adalah meningkat terus mulai dari 8,92 persen sampai sekitar 11,14 persen. Namun tahun 2017 mengalami penurunan hingga 10,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran dari konsumsi akhir ke inventasi, pertanda baik karena apabila konsumsi akhir meningkat terus tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian Kota Bontang. Oleh sebab itu perlu untuk terus mengenali sumber-sumber pertumbuhan untuk menstimulus bergairahnya aktivitas investasi di Kota Bontang yang akan meningkatkan nilai tambah di kota yang mempunyai julukan sebagai Kota Taman ini. Struktur perekonomian Kota Bontang dari sisi pengeluaran pada tahun 2017 ditampilkan oleh Grafik 3.4 dibawah ini.

Grafik 3.4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Menurut Pengeluaran Tahun 2017 (persen)



C.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2017 yang kembali tumbuh positif setelah setahun sebelumnya tumbuh negatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tercatat sebesar -5,72 persen. Penurunan perekonomian Kota Bontang makin melambat pada tahun 2014 menjadi sebesar -3,23 persen. Memasuki tahun 2015, Kota Bontang mengalami laju pertumbuhan perekonomian positif sebesar 4,35 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terakhir kali diraih oleh Kota Bontang pada tahun 2008.

Pada tabel 3.7 dapat dilihat dari sisi pengeluaran komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2017 adalah komponen pengeluaran konsumsi akhir LNPRT yaitu 9,59 persen, disusul komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yaitu sebesar 6,74 persen. Hal tersebut menandakan terjadinya peningkatan volume investasi di Kota Bontang sepanjang 2017 yang dampaknya dapat dirasakan pada peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan positif juga terjadi pada

komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan komponen ekspor neto, masing 2,41 persen dan 0,05 persen. Peningkatan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang di tahun 2017. Sedangkan kenaikan volume ekspor neto disebabkan oleh penurunan volume impor barang dan jasa, baik dari luar negeri maupun dari luar daerah.

Sedangkan komponen pengeluaran pemerintah dan perubahan inventori tumbuh negatif di tahun 2017. Defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah masih berlanjut di tahun 2017, penurunan volume belanja barang dan jasa oleh pemerintah masih terjadi, ditandai dengan laju pertumbuhan yang negatif yakni sebesar -18,96 persen, sedangkan perubahan inventori turun -16,83 dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dari sisi komponen pengeluaran Tahun 2013-2017 lebih lengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013—2017 (persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,86	4,04	2,04	1,58	2,41
2. Konsumsi LNPRT	16,61	8,41	7,51	-7,29	9,59
3. Konsumsi Pemerintah	8,14	1,28	5,01	-25,77	-18,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,10	4,08	-2,49	-32,61	6,74
5. Perubahan Inventori	257,92	64,94	-92,85	-25,77	-16,83
6. Ekspor Neto	-9,66	-6,56	8,54	5,24	0,05
PDRB	-5,72	-3,23	4,36	-1,38	0,68

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Kontribusi terbesar penyumbang Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini. Pada tahun 2017 kontribusi terbesar dipegang oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yaitu sebesar 6,89 persen. Peningkatan investasi di Kota Bontang sepanjang 2017 telah membangkitkan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang semula tumbuh negative di tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar kedua diduduki oleh komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, disusul Ekspor Neto dan komponen pengeluaran konsumsi akhir LNPRT.

Tabel 3.8. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013—2017 (persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.62	3.08	1.67	1.27	1.99
2. Konsumsi LNPRT	0.45	0.28	0.28	-0.28	0.35
3. Konsumsi Pemerintah	1.25	0.23	0.93	-4.78	-2.65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.22	6.08	-3.99	-48.81	6.89
5. Perubahan Inventori	7.12	6.80	-16.58	-0.32	-0.16
6. Ekspor Neto	-74.90	-48.79	61.29	39.09	0.39
PDRB	-5,72	-3,23	4,36	-1,38	0,68

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

C.3 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Perekonomian Kota Bontang secara makro dapat juga diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (nilai nominal). Nilai nominal PDRB Kota Bontang sampai saat ini masih didominasi oleh aktivitas ekspor neto (ekspor dikurangi impor), baik antar daerah maupun antar negara. Terjadinya pelemahan harga komoditas migas di pasar global turut mempengaruhi nilai nominal PDRB Kota Bontang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir nilai nominal PDRB Kota Bontang mengalami fluktuasi, dimana pada periode 2013—2014 terjadi kenaikan nilai PDRB sekitar 8,34 persen dan pada periode 2014—2016 terjadi penurunan nilai PDRB sekitar -8,67 persen. Perubahan nilai PDRB ditentukan oleh dua faktor utama yaitu perubahan volume produksi dan perubahan harga, yang masing-masingnya dipengaruhi oleh berbagai hal. Dinamika nilai nominal PDRB Kota Bontang beserta komponen pembentuknya dalam lima tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 2. Di bawah ini.

Tabel 3.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bontang Tahun 2013-2017 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.961.301,79	4.372.069,55	4.691.380,27	4.949.204,81	5.238.145,57
2. Konsumsi LNPRT	174.190,31	202.500,58	233.875,89	226.906,71	256.434,74
3. Konsumsi Pemerintah	883.803,80	1.055.503,34	1.221.616,46	979.610,47	815.971,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.177.218,62	7.726.545,39	7.844.447,69	5.801.534,49	6.424.549,75
5. Perubahan Inventori	1.057.462,94	1.830.329,17	-106.783,60	51.483,69	45.401,47
6. Ekspor neto	43.024.101,27	43.868.365,35	44.716.318,34	43.225.133,48	46.007.128,78
PDRB	56.278.078,73	59.055.313,39	58.600.855,04	55.233.873,65	58.787.632,05

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017 nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 58,79 triliun rupiah atau meningkat sekitar 3,55 triliun rupiah apabila dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta sepanjang tahun 2016. Apabila dilihat menurut masing-masing komponen pengeluarannya, peningkatan tersebut tidak terjadi pada semua komponen. Sebanyak empat dari enam komponen pengeluaran mengalami peningkatan nilai pada tahun 2016. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen ekspor neto yaitu bertambah sekitar 2,78 triliun rupiah dibanding tahun 2016. Aktivitas ekspor impor Kota Bontang berkaitan erat dengan aktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan yang merupakan motor utama penggerak perekonomian Kota Bontang, dimana komoditas utama industri pengolahan seperti LNG, pupuk, Amoniak, Metanol, dan beberapa komoditas hasil industri kecil seperti amplang dan pempek merupakan komoditas ekspor baik ke luar negeri maupun ke provinsi/kabupaten/kota lainnya. Begitu pula sebagian komoditas pertanian, seperti ikan dan rumput laut

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2017, mengalami peningkatan nilai terbesar kedua di dalam pembentukan PDRB Kota Bontang menurut pengeluaran, yaitu sekitar 623,02 juta rupiah atau bertambah 10,74 persen dari tahun sebelumnya. Komponen PMTB terdiri atas barang modal berupa bangunan dan bukan bangunan seperti mesin, peralatan, dan kendaraan.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi ketiga di dalam struktur PDRB Kota Bontang menurut pengeluaran, di bawah ekspor neto dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik. Kenaikan jumlah penduduk suatu wilayah akan mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut secara keseluruhan. Pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk sekitar 155,88 ribu jiwa, nilai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Kota Bontang adalah sebesar 3,96 triliun rupiah atau sekitar 25,41 juta

rupiah per orang per tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk naik menjadi 170,67 ribu jiwa. Seiring dengan penambahan penduduk tersebut, nilai nominal konsumsi rumah tangga Kota Bontang juga meningkat menjadi 5,24 triliun rupiah atau setara dengan 30,69 juta rupiah per orang per tahun.

Peranan pengeluaran konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) di dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran cukup rendah. Namun secara nominal (menurut harga berlaku), nilai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT naik cukup tinggi dari sebesar 174,19 miliar rupiah di tahun 2013 menjadi sebesar 256,43 miliar rupiah di tahun 2017, namun proporsi nilai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB Kota Bontang masih relatif rendah yaitu rata-rata sekitar 0,35 persen selama periode 2013-2017. Sumber kenaikan ini antara lain karena makin menjamurnya keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan perhatian dan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat di Kota Bontang seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bontang.

Nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah di Kota Bontang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai tahun 2015. Nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah di tahun 2013 tercatat sebesar 883,80 miliar rupiah, kemudian menjadi sebesar 1,05 triliun rupiah di tahun 2014, dan terus meningkat menjadi sebesar 1,23 triliun rupiah di tahun 2015. Dengan kata lain, terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sekitar 337,81 miliar rupiah dalam selang dua tahun. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bontang selama periode 2013-2015. Memasuki tahun 2016, kondisi perekonomian Kota Bontang kembali mengalami kontraksi dengan menurunnya penciptaan nilai tambah bruto. Kondisi tersebut juga berimbas pada terjadinya defisit anggaran bukan hanya pada Pemerintah Kota Bontang namun juga Pemerintah Pusat (nasional). Hal itu menyebabkan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah di Kota Bontang sepanjang tahun 2016 juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai

nominal pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Kota Bontang pada tahun 2016 tercatat sebesar 981,78 miliar rupiah atau turun sekitar 252,16 miliar rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada nilai riil pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, yakni turun sekitar 196,51 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan nilai yang dicapai pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 kondisi perekonomian Kota Bontang sudah sedikit membaik, namun tetap belum dapat memulihkan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Bontang khususnya dan nasional umumnya, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah di Kota Bontang masih turun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 815,97 milyar atau turun 163,64 milyar dibanding 2016.

Pada Tabel 3.9 di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2015 nilai nominal pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Kota Bontang masih menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 nilai PMTB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 7,18 triliun rupiah, pada tahun 2014 dan 2015, nilai PMTB Kota Bontang masih terlihat meningkat yakni masing-masing sebesar 7,73 triliun rupiah dan sebesar 7,84 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2016, dimana pada tahun tersebut terjadi kelesuan perekonomian yang bukan hanya terjadi di Kota Bontang, namun juga secara nasional dan global, nilai PMTB pun turun cukup besar sekitar 26,04 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai nominal PMTB Kota Bontang tahun 2016 tercatat sekitar 5,80 triliun rupiah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penurunan PMTB utamanya disebabkan oleh menurunnya realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Bontang sepanjang tahun 2016. Memasuki tahun 2017 nilai nominal PMTB kembali meningkat, investasi di Kota Bontang kembali menggeliat mencapai angka 6,42 triliun rupiah atau naik tajam daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,74 persen.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping

komponen ekspor neto). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan barang. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Dalam kurun waktu 5 tahun 2013-2017, di dua tahun pertama yaitu tahun 2013 dan tahun 2014 komponen perubahan inventori Kota Bontang bernilai positif sehingga proporsinya terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang menurut pengeluaran pun bernilai positif. Pada tahun 2013, porsi perubahan inventori terhadap PDRB Kota Bontang adalah sebesar 1,88 persen, kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2014 menjadi sekitar 3,10 persen. Di tahun 2015, nilai komponen perubahan inventori bertanda negatif yang menunjukkan bahwa persediaan di awal tahun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persediaan di akhir tahun. Perubahan inventori kembali bernilai positif di tahun 2016 dan 2017 dan berperan terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang menurut pengeluaran masing-masing sekitar 0,09 persen dan 0,08 persen saja.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bontang masih sangat bergantung pada barang dan jasa impor (luar negeri dan luar daerah). Namun demikian, aktivitas perekonomian Kota Bontang juga didominasi oleh industri pengolahan yang menghasilkan produk-produk ekspor. Apabila nilai ekspor Kota Bontang dikurangi dengan nilai impornya diperoleh nilai yang masih positif, dengan kata lain, nilai ekspor Kota Bontang lebih tinggi dari pada nilai impornya, hal ini memiliki makna bahwa neraca perdagangan Kota Bontang masih mengalami surplus. Perkembangan nilai ekspor neto Kota Bontang disajikan pada gambar 15 di bawah ini.

Pada Tabel 3.9 di atas terlihat bahwa nilai ekspor neto Kota Bontang pada tahun 2013 tercatat sebesar 43,02 triliun rupiah, atau setara dengan 76,45 persen nilai PDRB Kota Bontang di tahun tersebut. Pada tahun 2014, nilai ekspor neto Kota Bontang mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,87 triliun rupiah. Namun

peningkatan tersebut tidak sejalan dengan tingkat porsi ekspor neto terhadap PDRB, dimana pada tahun tersebut porsi ekspor neto Kota Bontang terhadap PDRB justru menurun menjadi sebesar 74,28 persen. Selanjutnya pada tahun 2015, nilai ekspor Kota Bontang kembali meningkat menjadi sebesar 44,72 triliun rupiah. Peningkatan tersebut diiringi pula dengan peningkatan proporsi ekspor neto terhadap PDRB yang menjadi sekitar 76,31 persen. Sedangkan pada tahun 2016, kondisi yang tidak sejalan antara nilai dan proporsi ekspor neto kembali terjadi. Pada tahun tersebut, nilai ekspor neto menurun hingga menjadi sebesar 43,225,13 miliar rupiah. Sedangkan proporsi ekspor neto terhadap PDRB di tahun 2016 justru meningkat menjadi sekitar 78,26 persen atau lebih tinggi dari proporsinya pada kurun waktu 2013-2015. Memasuki tahun 2017 nilai ekspor neto meningkat menjadi sebesar 46.007,13 miliar rupiah. Dan proporsi ekspor neto terhadap PDRB di tahun 2017 tetap di level 78,26 persen

C.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Efisiensi investasi dapat dilihat dari berapa koefisien ICOR yang diperoleh. *World economic study* menjelaskan bahwa 70 persen negara berkembang memiliki rasio modal output antara 3 dan 4 (Jhingan, 617: 2007). Rosenstein-Rodan dan Lewis (Arsyad, 232:2005) memperkirakan bahwa rasio efisiensi investasi terletak antara 3 sampai 4. Artinya bahwa investasi dikatakan efisien apabila nilai ICOR yang diperoleh berada antara 3 dan 4. Apabila nilai ICOR semakin kurang dari 3 maka dapat dikatakan investasi tersebut sangat efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila nilai ICOR melebihi 4 maka dapat dikatakan investasi tersebut semakin tidak efisien dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, dominasi migas dalam perekonomian Kota Bontang masih sangat besar. Penurunan jumlah produksi industri pengolahan migas menyebabkan performa laju pertumbuhan aktivitas ekonomi Kota Bontang negatif dalam periode 2010-2014 dan 2015. Sebaliknya, peningkatan produksi industri pengolahan migas menyebabkan performa yang positif dalam pertumbuhan perekonomian makro Kota Bontang. Dalam kondisi demikian, terdapat kekhasan aktivitas perekonomian Kota Bontang dibandingkan dengan karakteristik perekonomian makro pada umumnya. Oleh sebab itu, penghitungan nilai ICOR dalam publikasi ini sedikit disesuaikan, yaitu dengan mengeliminasi keterlibatan migas (baik pertambangan maupun industri), sehingga diperoleh gambaran ICOR yang lebih baik. Namun demikian, nilai PMTB yang digunakan adalah tetap PMTB total (tanpa memisahkan investasi yang dilakukan oleh migas) karena keterbatasan data yang tersedia untuk memisahkannya. Nilai ICOR Kota Bontang ditampilkan pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10. Analisis ICOR Kota Bontang Tahun 2011-2017

Tahun	PMTB ADHK	PDRB ADHK	ICOR <i>lag</i> 0	ICOR <i>lag</i> 1	ICOR <i>lag</i> 2	ICOR <i>lag</i> 3
	Tanpa Migas (Juta Rupiah)	Tanpa Migas (Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
2010	6,066,002.82	12,587,203.08				
2011	6,048,096.06	13,197,097.22	9.92	6.44		
2012	6,213,400.74	15,258,929.27	3.01	3.82	5.89	
2013	6,405,905.29	16,576,778.32	4.86	7.58	7.02	67.38
2014	6,667,290.87	17,190,529.54	10.86	8.52	91.84	72.97
2015	6,501,301.90	18,199,267.95	6.44	129.60	97.23	
2016 ^{*)}	4,381,131.03	18,225,006.00	170.22	135.16		
2017 ^{**)}	4,676,213.47	18,472,201.13	18.92			

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara umum nilai koefisien ICOR *lag* 0 Kota Bontang tahun 2017 sebesar 18,92 yang berarti bahwa untuk meningkatkan 1 juta rupiah output non migas diperlukan tambahan modal (investasi) 18,92 juta rupiah pada tahun yang sama. Nilai ini menunjukkan investasi Kota Bontang pada tahun 2017 dapat dikatakan tidak efisien dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Nilai ICOR *lag* 0 tertinggi pada tahun 2016 yaitu mencapai 170,22 yang berarti bahwa untuk meningkatkan output non migas sebesar 1 juta rupiah diperlukan investasi atau tambahan modal mencapai 170,22 juta rupiah pada tahun yang sama. Nilai ini dinilai sangat tidak efisien. Hal ini berkaitan dengan kondisi Kota Bontang yang sedang defisit pada tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 3.10, terlihat beberapa investasi yang memiliki pola tertentu. Pada tahun 2011 dan 2016 menunjukkan nilai ICOR yang semakin mengecil bersamaan dengan semakin besar *lag* yang dihitung. Hal ini menunjukkan investasi yang dilakukan kemungkinan merupakan investasi jangka menengah atau panjang. Sehingga hasilnya kemungkinan akan terlihat dalam periode waktu 5 sampai dengan 10 tahun atau lebih. Sebaliknya, pada tahun 2012 menunjukkan nilai ICOR yang semakin besar bersamaan dengan semakin besar *lag*

yang dihitung. Hal ini menunjukkan investasi yang dilakukan pada tahun 2012 merupakan investasi jangka pendek, namun investasi ini dinilai cukup efektif dalam memacu pertumbuhan ekonomi non migas Kota Bontang..

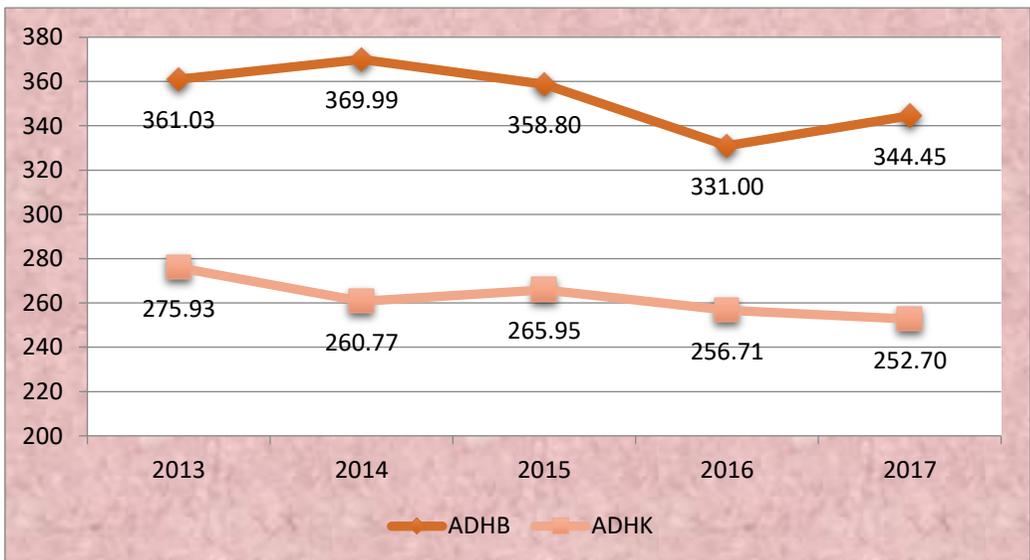
Namun demikian perlu diingat bahwa ICOR bukanlah satu-satunya indikator untuk mengevaluasi efektivitas investasi. Keberadaan *time lag* bagi kapital untuk menghasilkan surplus usaha, serta adanya perbedaan karakteristik investasi pada lapangan usaha yang berbeda merupakan komponen penting dalam penghitungan metode ini. Sehingga ke depannya, efektivitas investasi melalui metode ini akan lebih bagus apabila dilakukan dengan periode yang lebih panjang dan dapat diklasifikasikan menurut masing-masing lapangan usaha.

D. PDRB PERKAPITA

Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah itu. Angka PDRB per kapita biasanya diturunkan dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga nilainya menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk selama periode tersebut. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara/wilayah. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak karena di dalam nilai PDRB per kapita masih terkandung nilai penyusutan dan pajak, serta nilai keuntungan usaha yang belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk negara/wilayah bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila barang modal yang terlibat di dalam proses produksi bukanlah milik penduduk setempat. Dengan kata lain, pemilik modal adalah penduduk dari luar negeri/luar wilayah, sehingga keuntungan usaha pun akan mengalir ke luar negeri/luar wilayah tersebut.

Selama periode 2013—2017, nilai PDRB per kapita Kota Bontang baik ADHB maupun ADHK mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, dengan jumlah

penduduk sekitar 170 ribu jiwa, PDRB per kapita Kota Bontang mencapai nilai 344,45 juta rupiah. Dengan kata lain, rata-rata setiap satu orang penduduk Kota Bontang pada tahun 2017 mampu menghasilkan produk domestik sebesar 344,45 juta per tahun atau sekitar 28,71 juta per bulan. Nilai PDRB per kapita Kota Bontang merupakan nilai PDRB per kapita tertinggi di Kalimantan Timur selama periode 2013—2017 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.



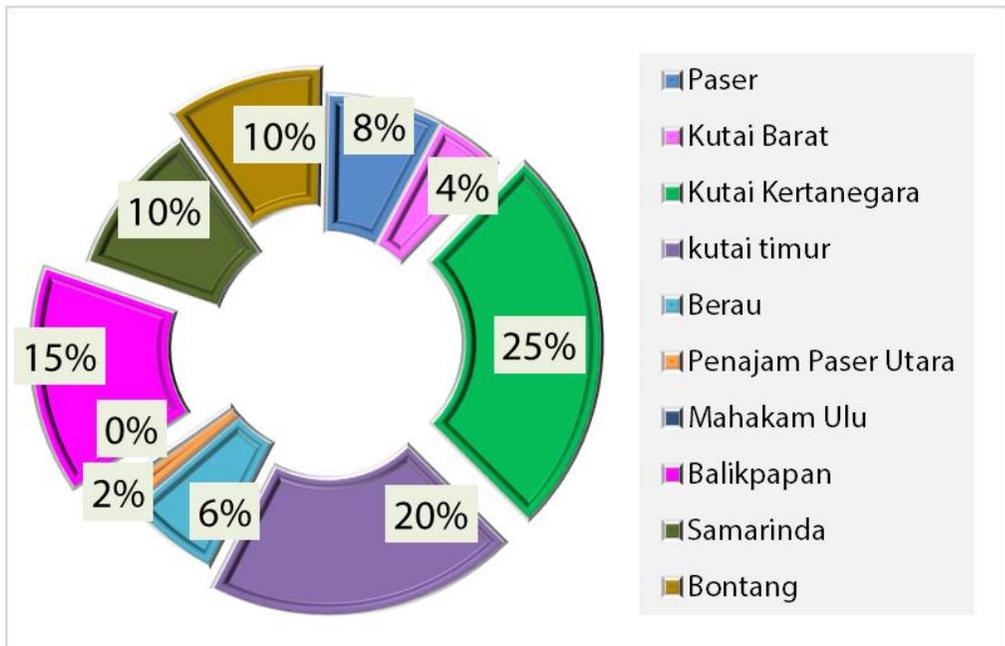
Grafik 3.5. PDRB Perkapita Kota Bontang, Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

E. PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bontang dengan migas mencapai 58,79 triliun rupiah atau sekitar 10,04 persen dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur. PDRB Kota Bontang merupakan yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara (25,33 persen), Kutai Timur (20,12 persen), dan Kota Balikpapan (14,81 persen). Nilai PDRB terkecil di Kalimantan Timur dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu yang besarnya hanya

2,34 triliun rupiah. Grafik distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dapat terlihat pada Grafik 3.6 seperti di bawah ini.

**Grafik 3.6. PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (dengan migas)
Tahun 2017 (persen)**

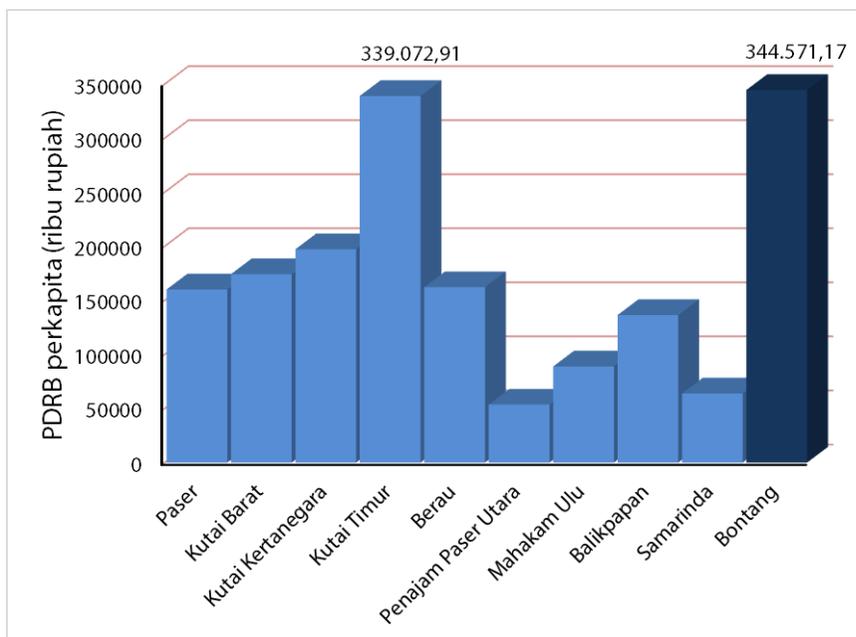


Secara umum, kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami kontraksi atau menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,36 persen. Terjadinya peningkatan beberapa komoditas energi di pasar dunia, seperti kondisi migas dan batubara di tahun 2017, membuat kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun tersebut mulai membaik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 3,13 persen. Kondisi tersebut tentunya juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang meningkat di tahun ini yaitu Kabupaten Paser sebesar 1,13 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 3,58 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 1,36 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 3,17 persen, Kabupaten Berau sebesar 3,01 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,34 persen, Kabupaten

Mahakam Ulu sebesar 4,23 persen, Kota Balikpapan sebesar 3,78 persen, Kota Samarinda sebesar 3,62 persen, serta Kota Bontang sebesar 0,68 persen.

Dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, nilai PDRB kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga diperoleh nilai PDRB per kapita. Apabila nilai PDRB suatu wilayah besar dan jumlah penduduk sedikit, maka dapat dipastikan PDRB per kapita wilayah tersebut akan besar begitu pula sebaliknya. Namun, angka PDRB per kapita masih bukan merupakan alat ukur paling ideal untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat karena di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan barang-barang modal dan pajak tak langsung neto serta pendapatan faktor produksi neto. Nilai tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata karena hanya merupakan nilai rata-rata. PDRB per kapita kabupaten/kota di Kalimantan Timur dapat terlihat pada Gambar 5.2. di bawah ini.

Grafik 3.7. PDRB Per Kapita Kabupaten/kota di Kalimantan Timur Tahun 2017 (ribu rupiah)



Pada tahun 2017, PDRB per Kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi dialami oleh

Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 18,84 persen. Selanjutnya, diikuti oleh Kabupaten Kutai Barat (15,86 persen), dan Kabupaten Paser (15,13 persen). Namun, apabila diamati dari nilai PDRB per kapita yang tertinggi, Kota Bontang masih berada pada peringkat pertama dengan nilai nominal sebesar 344,57 juta rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan 4,10 persen dari tahun sebelumnya. Posisi berikutnya adalah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yaitu sebesar 339,07 juta rupiah dan 197 juta rupiah. Sementara itu, PDRB per kapita terendah dimiliki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 53,58 juta rupiah.

F. HUBUNGAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMISKINAN

Hubungan antara PDRB Pengeluaran dapat dengan ketenagakerjaan dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu ILOR. Indikator ini menggambarkan seberapa besar tenaga kerja yang terserap / yang dibutuhkan setiap kenaikan 1% kenaikan laju pertumbuhan ekonomi. Adapun angka ILOR Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Analisis ILOR Kota Bontang Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB ADHK (Juta Ripah)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	ILOR
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	43.012.336.35	63.899	
2014	41.622.133.43	68.526	-2.02158
2015	43.437.183.63	69.371	0.291509
2016 ^{*)}	42.836.359,11		
2017 ^{**)}	43.128.297.41	68.190	2.418204

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai ILOR yang negatif tidak dapat diinterpretasikan. Sedangkan ILOR pada tahun 2015 perubahan pertumbuhan pendapatan sebesar 0.041786 dan perubahan jumlah tenaga kerja sebesar 0.012181 maka diperoleh nilai ILOR sebesar 0.2915. Hal ini berarti setiap kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan menyerap sebesar 29-30 tenaga kerja di tahun 2015. Dikarenakan keterbatasan data, tahun 2016 tidak tersedia data ketenagakerjaan (banyaknya jumlah tenaga kerja) sehingga tidak dapat dihitung nilai ILOR.

Adapun pada tahun 2017 PDRB ADHK mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya kelesuan aktivitas ekonomi di Kota Bontang, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi mudah tidaknya penduduk dalam mendapatkan pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah

tenaga kerja menurun dari tahun 2015 ke 2017 seiring dengan menurunnya PDRB ADHK. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, PDRB ADHK mengalami kenaikan di tahun 2017. Dikarenakan keterbatasan data ketenagakerjaan tahun 2016, maka tidak ada angka ILOR di tahun 2016.

Dengan lesunya keadaan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pengangguran pun meningkat dari 12.07 persen menjadi 12.44 persen di tahun 2017. Sebaliknya angka partisipasi kerja kota Bontang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4.32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 68.84 persen menjadi 64.52 persen.

D.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang masih didominasi oleh laki-laki dengan TPAK sebesar 83,45 persen, sedangkan perempuan sebesar 43,37 persen. Dibandingkan dengan tahun 2015, TPAK laki-laki mengalami penurunan yang sebelumnya adalah sebesar 83,47 persen. Di sisi lain, TPAK perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 52,50 persen. Penurunan TPAK Kota Bontang secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh adanya migrasi keluar yang lebih besar dibandingkan dengan migrasi masuk selama tahun 2016 dan 2017. Dengan asumsi penduduk yang melakukan migrasi adalah penduduk usia kerja, semakin besar penduduk yang pindah keluar Bontang maka akan mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang.

Seiring tingginya TPAK tidak menjamin semakin tingginya persentase penduduk yang bekerja. Persentase penduduk yang bekerja di Kota Bontang tahun 2017 adalah sebesar 56,49 persen atau sebesar 68190 jiwa. Seiring dengan penurunan TPAK dari tahun 2017 dibanding tahun 2015, persentase penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan dimana di tahun 2015 adalah sebesar 60,53 persen. Dari seluruh penduduk yang bekerja, mayoritas merupakan penduduk yang tidak/belum menamatkan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 22,34

persen, diikuti oleh penduduk tamatan SMA yaitu sebesar 17,8 persen dan tamatan SMP sebesar 14,73 persen. Bursa kerja Kota Bontang masih didominasi oleh laki-laki, dimana jumlah pekerja laki-laki sebesar dua kali pekerja perempuan berturut-turut sebesar 46.009 dan 22.181. Sedangkan jika dilihat dari komposisi umur, mayoritas pekerja adalah penduduk yang berumur 35-44 tahun.

Apabila dipandang dari sisi pengangguran, didapatkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Bontang Tahun 2017 sebesar 12,44 persen, dimana mengalami peningkatan yang sebelumnya tahun 2015 adalah sebesar 12,07 persen. Mayoritas pengangguran Kota Bontang adalah penduduk yang tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 25,06 persen di ikuti dengan penduduk tamatan Universitas yaitu sebesar 24,56 persen. Hal ini yang harus menjadi perhatian, dimana pengangguran juga didominasi oleh penduduk lulusan Universitas, yang mana secara tingkatan pendidikan mereka memiliki nilai jual lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan dibawahnya.

Adanya kenaikan persentase TPT Kota Bontang dapat disebabkan oleh kurangnya penyerapan tenaga kerja dan juga adanya "excess labor supply". Tercatat pada tahun 2017 terdapat sebanyak 11535 orang mencari pekerjaan (labor supply) sedangkan permintaan tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebesar 1443 orang (labor demand). Hal inilah yang dinamakan excess labor supply, dimana penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Terdapat sekitar 10.392 yang pasti tidak mendapatkan perkerjaan. Dari permintaan tenaga kerja sebesar 1443, tidak semua terserap dalam permintaan ini. Tercatat pada tahun 2017, masih terdapat para pelamar yang belum ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 6.983 pelamar. Di tahun 2017 yang sudah terserap / ditempatkan adalah sebesar 1800 pelamar sedangkan 8.846 pelamar dihapuskan dalam bursa kerja. Sehingga masih ada sebesar 7872 pelamar yang belum mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, terdapat peningkatan jumlah penawaran tenaga kerja dari 8088 pada tahun 2016 menjadi 11535 pada tahun 2017. Dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 42,62 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan permintaan tenaga kerja menurun dari 1904 di tahun 2016 menjadi 1443 di tahun 2017, atau sebesar 24,21 persen penurunan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya TPT di Kota Bontang.

D.2 KEMISKINAN DAN PDRB PENGELUARAN

Menurunnya Angka Partisipasi Kerja dan meningkatnya pengangguran, nampaknya tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Kota Bontang. Tercatat bahwa Total Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB menurut ADHB adalah sebesar 5,24 Triliun Rupiah. Angka ini menyumbang sebesar 8,91 persen dari total PDRB menurut ADHB di Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya trend total konsumsi rumah tangga adalah positif yaitu terus bertambah di tiap tahunnya. Dengan total konsumsi rumah tangga sebesar 5,24 triliun, rata-rata konsumsi per kapita per tahun pada PDRB menurut ADHB adalah sebesar 30.691 juta rupiah. Rata-rata konsumsi per kapita per tahun terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari PDRB menurut ADHK 2010, didapati bahwa rata-rata pengeluaran perkapita per tahun mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar -0.28 dan -0.57. Adapun pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0.33 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meningkatnya rata-rata konsumsi per kapita per tahun, juga tidak terlepas dari semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan juga adanya inflasi. Adapun jika dipandang dari sudut lain, peningkatan konsumsi di dalam rumah tangga dapat menjadikan indikator pendekatan pendapatan. Di asumsikan semakin besar pengeluaran konsumsi per kapita juga akan meningkatkan pendapatan atau semakin sejahtera. Di Kota Bontang sendiri persentase penduduk miskin pada tahun 2017 adalah sebesar 5.16 persen yaitu menurun dibandingkan

dengan tahun 2016 yaitu sebesar 5.18 persen. Meningkatnya pengeluaran per kapita juga akan berpengaruh terhadap perhitungan garis kemiskinan yang juga dihitung berdasarkan pengeluaran makanan dan non makanan. Pada tahun 2017 sendiri garis kemiskinan Kota Bontang adalah sebesar 542985 rupiah yang tahun sebelumnya sebesar 513205 rupiah.

Peningkatan pengeluaran per kapita atau semakin sejahtera masyarakat, belum tentu terdapat pemerataan pendapatan di dalam suatu wilayah. Pemerataan pendapatan di wilayah Kota Bontang dapat dilihat dari besarnya Indeks Gini Ratio. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 0.39 yaitu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0.36. Semakin besar angka Gini Ratio maka semakin tidak ratanya distribusi pendapatan. Dapat dilihat dengan gini rasio sebesar 0.39 sebesar 47.3 persen total pendapatan dinikmati hanya oleh 20 persen kelompok dengan pengeluaran tinggi (kaya), sedangkan sebesar 16.8 persen pendapatan dinikmati oleh 40 persen kelompok dengan pengeluaran terendah (miskin).

Kesenjangan tidak hanya terjadi pada seluruh kalangan masyarakat (dari yang kaya hingga yang miskin), namun juga di alami oleh kelompok penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P₂) yaitu seberapa besar ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin. Semakin besar angka indeksnya maka semakin besar pula ketimpangannya. Adapun di Kota Bontang sendiri indeks P₂ pada tahun 2017 adalah sebesar 0.25. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.20 pada tahun 2016 dan 0.12 pada tahun 2015.

Adapun untuk melihat seberapa dalam keparahan kemiskinan dapat dilihat dengan indeks Keparahhan Kemiskinan (P₁). Indeks ini mengukur seberapa besar jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kota Bontang sendiri pada tahun 2017 memiliki indeks P₁ sebesar 0.92. Hal ini

meningkat jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.84 di tahun 2016 dan 0.64 di tahun 2015. Semakin besar angka indeks maka akan semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan kondisi kedalaman kemiskinan Kota Bontang semakin memburuk begitu pula dengan keparahan kemiskinan.

BAB IV PENUTUP

- 1 Nilai nominal PDRB Kota Bontang pada tahun 2017 mencapai 58.787.632,05 juta rupiah, atau menurun sekitar 3,55 triliun rupiah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beberapa komponen utama pembentuk PDRB Kota Bontang,
- 2 Struktur ekonomi Kota Bontang didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi mencapai 83,95 persen pada tahun 2017. Sedangkan dari sisi pengeluaran Struktur perekonomian Kota Bontang sangat didominasi komponen ekspor neto 78,26 persen pada tahun 2017
- 3 Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 0,68 persen. Hal serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang juga mengalami peningkatan 1,36 persen. Dari sisi lapangan usaha penyumbang pertumbuhan terbesar dari kategori F (Konstruksi); P (Jasa Pendidikan); A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan); serta H (Transportasi dan Pergudangan). Sedangkan dari sisi pengeluaran hal itu terutama dipengaruhi oleh terjadinya pertumbuhan positif pada komponen pembentukan modal tetap bruto (investasi).
- 4 Hasil analisis *LQ* lapangan usaha dengan migas di Kota Bontang, menunjukkan. lapangan usaha Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan masing-masing memiliki rata-rata nilai *LQ* 4,13 dan 2,33. Hal ini menjadikan kedua lapangan usaha tersebut sebagai sektor basis ($LQ > 1$) di Kota Bontang., lapangan usaha tersebut memiliki keunggulan komparatif. Kedua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis ini jika dikembangkan memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Bontang.

- 5 Hasil Analisis ICOR diperoleh, nilai koefisien ICOR *lag* o Kota Bontang tahun 2017 sebesar 18,92 yang berarti bahwa untuk meningkatkan 1 juta rupiah output non migas diperlukan tambahan modal (investasi) 18,92 juta rupiah pada tahun yang sama. Nilai ini menunjukkan investasi Kota Bontang pada tahun 2017 dapat dikatakan tidak efisien dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama.
- 6 Dengan jumlah penduduk sekitar 170 ribu jiwa, PDRB per kapita Kota Bontang mencapai nilai 344,45 juta rupiah. atau sekitar 28,71 juta per bulan. Nilai PDRB per kapita Kota Bontang merupakan nilai PDRB per kapita tertinggi di Kalimantan Timur.
- 7 Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bontang dengan migas mencapai 58,79 triliun rupiah atau sekitar 10,04 persen dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur. PDRB Kota Bontang merupakan yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara (25,33 persen), Kutai Timur (20,12 persen), dan Kota Balikpapan (14,81 persen).
- 8 Hasil Analisis ILOR, kondisi Ekonomi Tahun 2017 melesu jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pengangguran pun meningkat dari 12.07 persen menjadi 12.44 persen di tahun 2017. Sebaliknya angka partisipasi kerja kota Bontang mengalami penurunan dari 68.84 persen tahun 2015 menjadi 64.52 persen di tahun 2017.

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013—2017

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	366.597,5	453.171,9	514.903,7	477.868,5	563.785,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	38.871,1	40.134,7	45.968,8	45.199,5	47.828,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	164,4	185,7	193,2	191,9	179,3
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	327.562,0	412.851,5	468.741,7	432.477,1	515.777,7
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	1.432.541,4	1.117.139,8	810.849,1	339.865,1	483.336,6
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	1.432.541,4	1.117.139,8	810.849,1	339.865,1	483.336,6
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	48.067.921,9	50.518.892,1	49.841.769,5	46.632.769,7	49.349.647,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	6.705,8	7.599,1	12.296,2	13.834,1	16.175,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/<i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8.103,6	8.687,2	9.289,9	10.085,6	12.453,7
F	Konstruksi/<i>Construction</i>	2.230.742,6	2.407.378,0	2.528.473,0	2.590.489,4	2.886.704,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.180.323,2	1.276.902,8	1.358.910,6	1.405.663,6	1.468.937,8
H	Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>	552.126,6	587.972,5	618.403,9	654.887,8	701.316,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	186.647,8	203.618,1	220.394,4	228.157,7	257.512,5
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	45.362,0	48.699,6	52.052,1	40.649,5	45.336,2
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	141.285,8	154.918,5	168.342,2	187.508,2	212.176,3

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	318.264,4	348.125,1	368.234,0	391.721,7	401.215,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	358.490,0	387.396,9	393.908,3	397.585,9	400.030,9
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	184.504,2	198.778,1	208.759,2	220.878,6	234.353,1
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	191.931,0	211.229,9	216.213,9	213.712,5	231.199,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	533.874,9	583.551,4	655.250,9	717.769,3	743.143,0
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	323.691,5	369.590,8	423.117,4	464.711,2	513.588,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	228.364,9	256.768,5	284.324,1	317.277,2	343.631,8
R,S,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	107.247,5	118.511,1	135.757,0	156.595,8	180.600,0
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		56.278.078,7	59.055.313,4	58.600.855,0	55.233.873,6	58.787.632,1
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product @</i>		20.800.710,1	21.155.525,2	24.029.912,4	24.814.493,6	25.755.125,6

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

@ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013—2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	294.318,8	353.995,4	374.762,1	348.526,7	368.363,6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa <i>Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	36.347,5	36.554,6	40.120,7	38.647,3	39.177,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	202,1	204,3	207,1	214,7	206,1
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	257.769,2	317.236,5	334.434,3	309.664,8	328.980,1
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	964.493,9	665.860,5	621.654,1	395.075,6	441.268,5
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	964.493,9	665.860,5	621.654,1	395.075,6	441.268,5
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	36.256.075,5	34.869.243,0	36.530.202,2	36.127.853,0	36.125.004,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	7.646,0	9.038,3	12.178,2	12.977,7	13.685,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/<i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	7.247,8	7.480,2	7.790,2	8.265,4	9.230,9
F	Konstruksi/<i>Construction</i>	1.950.847,2	1.991.244,3	2.029.310,5	2.000.217,0	2.137.033,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	999.537,9	1.039.278,3	1.063.278,2	1.046.853,9	1.055.022,4
H	Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>	496.846,3	516.466,8	528.885,0	548.814,8	569.228,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	150.709,2	155.377,7	159.765,9	159.741,7	173.661,4
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	37.715,9	38.797,9	39.144,9	31.352,4	33.673,5

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	112.993,3	116.579,9	120.621,0	128.389,3	139.987,9
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	312.480,8	339.822,5	358.143,6	379.586,6	379.397,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	296.961,3	304.999,7	306.002,7	307.168,0	301.278,4
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	169.842,7	175.203,3	181.384,2	187.691,5	189.607,8
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	177.556,6	192.842,6	197.376,9	192.930,3	197.401,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	406.625,6	428.262,1	451.576,8	459.150,6	455.053,4
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	245.132,9	277.125,5	304.745,1	328.470,7	357.136,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	181.486,1	195.059,0	203.672,4	219.659,7	232.558,6
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	94.527,9	100.834,3	106.455,3	113.376,0	123.365,4
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		43.012.336,3	41.622.133,4	43.437.183,6	42.836.359,1	43.128.297,4
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product @</i>		16.576.778,3	17.190.529,5	18.199.267,9	18.225.006,0	18.472.201,1

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

@ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	0,65	0,77	0,88	0,87	0,96
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Perikanan/Fishery	0,58	0,70	0,80	0,78	0,88
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,55	1,89	1,38	0,62	0,82
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	2,55	1,89	1,38	0,62	0,82
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	85,41	85,55	85,05	84,43	83,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/Construction	3,96	4,08	4,31	4,69	4,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,10	2,16	2,32	2,54	2,50
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	0,98	1,00	1,06	1,19	1,19

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,33	0,34	0,38	0,41	0,44
1	Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	0,08	0,08	0,09	0,07	0,08
2	Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	0,25	0,26	0,29	0,34	0,36
J	Informasi dan Komunikasi/<i>Information and Communication</i>	0,57	0,59	0,63	0,71	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/<i>Financial and Insurance Activities</i>	0,64	0,66	0,67	0,72	0,68
L	Real Estat/<i>Real Estate Activities</i>	0,33	0,34	0,36	0,40	0,40
M,N	Jasa Perusahaan/<i>Business Activities</i>	0,34	0,36	0,37	0,39	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/<i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,95	0,99	1,12	1,30	1,26
P	Jasa Pendidikan/<i>Education</i>	0,58	0,63	0,72	0,84	0,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/<i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,41	0,43	0,49	0,57	0,58
R,S,T, U	Jasa lainnya/<i>Other Services Activities</i>	0,19	0,20	0,23	0,28	0,31
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013—2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	0,68	0,85	0,86	0,81	0,85
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Perikanan/Fishery	0,60	0,76	0,77	0,72	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,24	1,60	1,43	0,92	1,02
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	2,24	1,60	1,43	0,92	1,02
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	84,29	83,78	84,10	84,34	83,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Remediation Activities</i>					
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,54	4,78	4,67	4,67	4,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,32	2,50	2,45	2,44	2,45
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,16	1,24	1,22	1,28	1,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,35	0,37	0,37	0,37	0,40
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	0,09	0,09	0,09	0,07	0,08
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	0,26	0,28	0,28	0,30	0,32
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,73	0,82	0,82	0,89	0,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,69	0,73	0,70	0,72	0,70
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,39	0,42	0,42	0,44	0,44
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,41	0,46	0,45	0,45	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,95	1,03	1,04	1,07	1,06
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,57	0,67	0,70	0,77	0,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,42	0,47	0,47	0,51	0,54
R,S,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,22	0,24	0,25	0,26	0,29
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,0	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	29,2	23,6	13,6	-7,2	18,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	16,0	3,3	14,5	-1,7	5,8
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	4,3	13,0	4,0	-0,7	-6,6
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	31,0	26,0	13,5	-7,7	19,3
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	-32,2	-22,0	-27,4	-58,1	42,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	-32,2	-22,0	-27,4	-58,1	42,2
	2 Pertambangan Batubara dan Lignite/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	4,0	5,1	-1,3	-6,4	5,8

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,5	13,3	61,8	12,5	16,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	1,2	7,2	6,9	8,6	23,5
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,5	7,9	5,0	2,5	11,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,1	8,2	6,4	3,4	4,5
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9,0	6,5	5,2	5,9	7,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	10,9	9,1	8,2	3,5	12,9
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	9,2	7,4	6,9	-21,9	11,5
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	11,5	9,6	8,7	11,4	13,2
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,7	9,4	5,8	6,4	2,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	17,3	8,1	1,7	0,9	0,6
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	9,4	7,7	5,0	5,8	6,1
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13,4	10,1	2,4	-1,2	8,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	10,4	9,3	12,3	9,5	3,5
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	22,1	14,2	14,5	9,8	10,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,0	12,4	10,7	11,6	8,3
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10,9	10,5	14,6	15,4	15,3
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		3,24	4,93	-0,77	-5,75	6,43
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product @</i>		17,12	1,71	13,59	3,27	3,79

Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

@ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	17,91	20,28	5,87	-7,00	5,69
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	13,24	0,57	9,76	-3,67	1,37
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	2,17	1,09	1,40	3,64	-4,00
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	18,62	23,07	5,42	-7,41	6,24
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	-30,78	-30,96	-6,64	-36,45	11,69
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	-30,78	-30,96	-6,64	-36,45	11,69
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	-6,39	-3,83	4,76	-1,10	-0,01

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,95	18,21	34,74	6,56	5,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,84	3,21	4,14	6,10	11,68
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2,01	2,07	1,91	-1,43	6,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,93	3,98	2,31	-1,54	0,78
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,79	3,95	2,40	3,77	3,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,02	3,10	2,82	-0,02	8,71
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	2,47	2,87	0,89	-19,91	7,40
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	4,54	3,17	3,47	6,44	9,03
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,10	8,75	5,39	5,99	-0,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	9,51	2,71	0,33	0,38	-1,92
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,58	3,16	3,53	3,48	1,02
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,80	8,61	2,35	-2,25	2,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,76	5,32	5,44	1,68	-0,89
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	16,14	13,05	9,97	7,79	8,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,14	7,48	4,42	7,85	5,87
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	7,09	6,67	5,57	6,50	8,81
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		-5,72	-3,23	4,36	-1,38	0,68
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product @</i>		8,64	3,70	5,87	0,14	1,36

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*
 @ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2013—2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	153,0	184,03	194,83	181,19	191,50
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	121,5	122,18	134,10	129,18	130,95
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	115,9	117,15	118,79	123,11	118,19
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	158,9	195,50	206,10	190,84	202,74
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	82,9	57,20	53,40	33,94	37,91
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	87,3	60,30	56,30	35,78	39,96
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	75,3	72,46	75,91	75,08	75,07

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	140,1	165,59	223,11	237,76	250,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	116,3	120,01	124,99	132,61	148,10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	107,6	109,79	111,89	110,29	117,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	114,2	118,71	121,45	119,57	120,51
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	111,8	116,21	119,00	123,49	128,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	112,2	115,68	118,94	118,93	129,29
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	129,6	139,17	148,75	116,17	129,56
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	142,2	155,97	169,48	188,78	213,61
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	123,7	134,48	141,73	150,22	150,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	126,9	130,33	130,76	131,26	128,74
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	112,6	116,20	120,30	124,48	125,75
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	142,5	154,72	158,36	154,79	158,38
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial					
O	Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	120,2	126,61	133,51	135,74	134,53
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	150,7	170,41	187,39	201,98	219,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	111,9	120,25	125,56	135,41	143,36
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	122,5	130,69	137,98	146,95	159,89
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		79,27	76,71	80,06	78,95	79,49
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product @</i>		131,70	136,57	144,59	144,79	146,75

Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013—2017

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	129,8	153,01	194,83	139,63	125,16
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	107,3	121,49	134,10	120,40	107,79
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	113,4	115,89	118,79	108,54	101,98
	3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	133,9	158,86	206,10	142,50	127,63
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	119,7	82,85	53,40	28,35	45,75
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	126,2	87,34	56,30	28,35	45,75
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	80,5	75,34	75,91	93,28	99,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	129,8	140,08	223,11	183,22	178,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	115,3	116,28	124,99	115,00	127,36
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	105,4	107,57	111,89	104,59	109,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	109,8	114,17	121,45	108,85	105,55
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	106,7	111,79	119,00	115,75	114,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	107,9	112,20	118,94	110,25	115,23
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	105,2	107,78	111,87	85,18	89,28
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	108,8	113,76	121,44	118,79	123,89
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	115,5	123,66	141,73	130,10	121,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	115,9	126,90	130,76	113,28	101,45
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	106,7	112,64	120,30	116,67	111,64
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	128,6	142,46	158,36	120,39	111,18
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	113,7	120,22	133,51	119,42	111,91
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	129,8	150,74	187,39	155,62	145,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	107,4	111,88	125,56	126,04	128,14
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	114,4	122,52	137,98	128,44	130,51
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		84,09	79,27	80,06	93,89	100,27
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product @</i>		121,23	131,70	144,59	119,44	111,43

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

@ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2013–2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	124,6	128,0	137,4	137,1	153,1
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa <i>Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	106,9	109,8	114,6	117,0	122,1
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	81,3	90,9	93,3	89,4	87,0
3	Perikanan/ <i>Fishery</i>	127,1	130,1	140,2	139,7	156,8
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	148,5	167,8	130,4	86,0	109,5
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	148,5	167,8	130,4	86,0	109,5
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	132,6	144,9	136,4	129,1	136,6

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	87,7	84,1	101,0	106,6	118,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	111,8	116,1	119,3	122,0	134,9
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	114,3	120,9	124,6	129,5	135,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	118,1	122,9	127,8	134,3	139,2
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	111,1	113,8	116,9	119,3	123,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	123,8	131,0	137,9	142,8	148,3
	1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	120,3	125,5	133,0	129,7	134,6
	2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	125,0	132,9	139,6	146,0	151,6
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	101,9	102,4	102,8	103,2	105,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	120,7	127,0	128,7	129,4	132,8
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	108,6	113,5	115,1	117,7	123,6
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	108,1	109,5	109,5	110,8	117,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	131,3	136,3	145,1	156,3	163,3
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	132,0	133,4	138,8	141,5	143,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	125,8	131,6	139,6	144,4	147,8
R,S,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	113,5	117,5	127,5	138,1	146,4
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		130,84	141,88	134,91	128,94	136,31
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product @</i>		125,48	123,07	132,04	136,16	139,43

Angka Sementara/*Preliminary Figures*

****Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
@ Tanpa Migas/Non Oil-Gas**

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	9,58	2,78	7,33	-0,21	11,63
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	2,4	2,67	4,36	2,08	4,38
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	2,1	11,76	2,60	-4,19	-2,67
3	Perikanan/ <i>Fishery</i>	10,4	2,41	7,70	-0,36	12,26
B	Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	-2,0	12,96	-22,26	-34,05	27,33
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	-2,0	12,96	-22,26	-34,05	27,33
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	11,1	9,28	-5,83	-5,40	5,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	-4,1	-4,13	20,09	5,58	10,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/<i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,4	3,87	2,68	2,32	10,56
F	Konstruksi/<i>Construction</i>	3,4	5,73	3,06	3,94	4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,0	4,05	4,02	5,06	3,69
H	Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>	4,0	2,45	2,71	2,05	3,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,6	5,81	5,27	3,54	3,82
1	Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	6,5	4,36	5,94	-2,50	3,84
2	Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service</i>	6,6	6,28	5,02	4,65	3,78

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Activities</i>						
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,6	0,58	0,37	0,37	2,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,1	5,22	1,35	0,55	2,58
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,6	4,44	1,44	2,25	5,03
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,4	1,33	0,01	1,12	5,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,4	3,78	6,49	7,73	4,47
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,1	1,00	4,11	1,90	1,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,7	4,61	6,05	3,47	2,30
R,S,T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,5	3,59	8,50	8,31	5,99
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		9,51	8,44	-4,92	-4,42	5,71
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product @</i>		7,81	-1,93	7,29	3,12	2,40

Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

@ Tanpa Migas/*Non Oil-Gas*

Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.961.301,79	4.372.069,55	4.691.380,27	4.949.204,81	5.238.145,57
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.238.707,02	1.361.083,00	1.528.536,69	1.699.245,57	1.848.591,16
1.b. Pakaian	113.806,42	120.214,45	127.288,48	128.242,40	126.448,71
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	1.070.273,15	1.180.496,11	1.219.234,78	1.238.758,30	1.251.867,30
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	737.167,43	825.590,68	871.830,51	898.235,57	964.483,79
1.e. Transportasi dan komunikasi	292.292,77	325.092,90	326.374,16	326.345,01	340.589,97
1.f. Restoran dan Hotel	259.633,00	292.096,83	336.448,77	347.484,16	373.983,27
1.g. Lainnya	249.421,99	267.495,58	281.666,88	310.893,81	332.181,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	174.190,31	202.500,58	233.875,89	226.906,71	256.434,74
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	883.803,80	1.055.503,34	1.221.616,46	979.610,47	815.971,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	7.177.218,62	7.726.545,39	7.844.447,69	5.801.534,49	6.424.549,75
5. Perubahan Inventori	1.057.462,94	1.830.329,17	(106.783,60)	51.483,69	45.401,47
6. Ekspor Neto	43.024.101,27	43.868.365,35	44.716.318,34	43.225.133,48	46.007.128,78
PDRB	56.278.078,73	59.055.313,39	58.600.855,04	55.233.873,65	58.787.632,05

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.281.161,91	3.413.802,43	3.483.433,26	3.538.546,03	3.623.979,36
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	997.295,21	1.036.253,12	1.064.159,98	1.089.664,46	1.151.606,72
1.b. Pakaian	99.905,45	102.854,60	111.957,09	104.741,93	100.012,42
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	897.003,26	921.477,05	934.924,01	925.330,91	902.005,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	612.579,38	641.282,36	649.188,53	677.071,21	702.627,93
1.e. Transportasi dan komunikasi	269.951,66	288.342,92	288.824,99	301.793,76	313.421,05
1.f. Restoran dan Hotel	201.035,96	209.176,88	218.937,48	216.583,45	227.591,54
1.g. Lainnya	203.390,99	214.415,51	215.441,18	223.360,32	226.714,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	145.042,20	157.240,14	169.045,53	156.715,27	171.742,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	758.088,56	767.758,75	806.247,45	598.506,61	485.022,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6.405.905,29	6.667.290,87	6.501.301,90	4.381.131,03	4.676.213,47
5. Perubahan Inventori	450.610,21	743.240,17	53.158,39	39.458,19	32.817,37
6. Ekspor	31.971.528,17	29.872.801,07	32.423.997,09	34.122.001,99	34.138.521,98
PDRB	43.012.336,35	41.622.133,43	43.437.183,63	42.836.359,11	43.128.297,41

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 13. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	7,04	7,40	8,01	8,96	8,91
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	2,20	2,30	2,61	3,08	3,14
1.b. Pakaian	0,20	0,20	0,22	0,23	0,22
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	1,90	2,00	2,08	2,24	2,13
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,31	1,40	1,49	1,63	1,64
1.e. Transportasi dan komunikasi	0,52	0,55	0,56	0,59	0,58
1.f. Restoran dan Hotel	0,46	0,49	0,57	0,63	0,64
1.g. Lainnya	0,44	0,45	0,48	0,56	0,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,31	0,34	0,40	0,41	0,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,57	1,79	2,08	1,77	1,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	12,75	13,08	13,39	10,50	10,93
5. Perubahan Inventori	1,88	3,10	(0,18)	0,09	0,08
6. Ekspor Neto	76,45	74,28	76,31	78,26	78,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 14. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	7,63	8,20	8,02	8,26	8,40
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	2,32	2,49	2,45	2,54	2,67
1.b. Pakaian	0,23	0,25	0,26	0,24	0,23
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2,09	2,21	2,15	2,16	2,09
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,42	1,54	1,49	1,58	1,63
1.e. Transportasi dan komunikasi	0,63	0,69	0,66	0,70	0,73
1.f. Restoran dan Hotel	0,47	0,50	0,50	0,51	0,53
1.g. Lainnya	0,47	0,52	0,50	0,52	0,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,34	0,38	0,39	0,37	0,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,76	1,84	1,86	1,40	1,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	14,89	16,02	14,97	10,23	10,84
5. Perubahan Inventori	1,05	1,79	0,12	0,09	0,08
6. Ekspor Neto	74,33	71,77	74,65	79,66	79,16
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 15. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	13,86	10,37	7,30	5,50	5,84
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	16,66	9,88	12,30	11,17	8,79
1.b. Pakaian	8,11	5,63	5,88	0,75	-1,40
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	10,57	10,30	3,28	1,60	1,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	15,02	12,00	5,60	3,03	7,38
1.e. Transportasi dan komunikasi	11,11	11,22	0,39	-0,01	4,37
1.f. Restoran dan Hotel	22,83	12,50	15,18	3,28	7,63
1.g. Lainnya	8,97	7,25	5,30	10,38	6,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	25,50	16,25	15,49	-2,98	13,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,65	19,43	15,74	-19,81	-16,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,73	7,65	1,53	-26,04	10,74
5. Perubahan Inventori	455,03	73,09	-105,83	-148,21	-11,81
6. Ekspor Neto	-0,14	1,96	1,93	-3,33	6,44
PDRB	3,24	4,93	-0,77	-5,75	6,43

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 16. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,86	4,04	2,04	1,58	2,41
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	7,27	3,91	2,69	2,40	5,68
1.b. Pakaian	3,48	2,95	8,85	(6,44)	(4,52)
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	3,97	2,73	1,46	(1,03)	(2,52)
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,54	4,69	1,23	4,30	3,77
1.e. Transportasi dan komunikasi	6,89	6,81	0,17	4,49	3,85
1.f. Restoran dan Hotel	9,89	4,05	4,67	(1,08)	5,08
1.g. Lainnya	12,06	5,42	0,48	3,68	1,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16,61	8,41	7,51	(7,29)	9,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,14	1,28	5,01	-25,77	-18,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,10	4,08	-2,49	-32,61	6,74
5. Perubahan Inventori	257,92	64,94	-92,85	-25,77	-16,83
6. Ekspor Neto	-9,66	-6,56	8,54	5,24	0,05
PDRB	-5,72	-3,23	4,36	-1,38	0,68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 17. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	120,73	128,07	134,68	139,87	144,54
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	124,21	131,35	143,64	155,94	160,52
1.b. Pakaian	113,91	116,88	113,69	122,44	126,43
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	119,32	128,11	130,41	133,87	138,79
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	120,34	128,74	134,30	132,66	137,27
1.e. Transportasi dan komunikasi	108,28	112,75	113,00	108,14	108,67
1.f. Restoran dan Hotel	129,15	139,64	153,67	160,44	164,32
1.g. Lainnya	122,63	124,76	130,74	139,19	146,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	120,10	128,78	138,35	144,79	149,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	116,58	137,48	151,52	163,68	168,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	112,04	115,89	120,66	132,42	137,39
5. Perubahan Inventori	234,67	246,26	-200,88	130,48	138,35
6. Ekspor Neto	134,57	146,85	137,91	126,68	134,77
PDRB	130,84	141,88	134,91	128,94	136,31

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 18. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Bontang

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,54	6,08	5,16	3,85	3,34
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	8,76	5,75	9,36	8,57	2,94
1.b. Pakaian	4,47	2,60	-2,72	7,69	3,26
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	6,35	7,37	1,80	2,65	3,67
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,97	6,98	4,31	-1,21	3,47
1.e. Transportasi dan komunikasi	3,95	4,13	0,23	-4,31	0,49
1.f. Restoran dan Hotel	11,77	8,13	10,05	4,40	2,42
1.g. Lainnya	-2,76	1,73	4,80	6,46	5,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,63	7,23	7,43	4,65	3,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,94	17,92	10,21	8,02	2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,58	3,43	4,12	9,75	3,75
5. Perubahan Inventori	55,07	4,94	-181,57	-164,95	6,03
6. Ekspor Neto	10,53	9,13	-6,09	-8,15	6,38
PDRB	9,51	8,44	-4,92	-4,42	5,71

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara